

BAGIAN ANGGARAN 087

anri

**LAPORAN KEUANGAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(AUDITED)**



Jl. Ampera Raya No. 7 Cilandak Jakarta Selatan

BAGIAN ANGGARAN 087



LAPORAN KEUANGAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(AUDITED)

Jl. Ampera Raya No.7 Cilandak Jakarta Selatan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 (*Audited*) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada ANRI. Disamping itu Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).



Jakarta, April 2016

Sekretaris Utama,

Drs. Sumrahadi, MIMS
NIP 19611009 198703 1 001

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	40
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	51
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	73
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	84
F. Pengungkapan Penting Lainnya	90

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015 (AUDITED)
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk tahun anggaran 2015 per tanggal 31 Desember 2015 (*Audited*) berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Arsip Nasional Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan diatas disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.



Jakarta, April 2016

Inspektur,

Bambang Surowo

NIP. 19621112 198903 1 001

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 (*Audited*) Arsip Nasional Republik Indonesia yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2016

Kepala,



Mustari Irawan

NIP 19590621 198703 1 001

Laporan Keuangan Audited Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015 untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10.577.067.174 atau mencapai 116,06 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp9.113.280.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp161.376.357.944 atau mencapai 93,79 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp172.052.947.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 .

Nilai Aset per tanggal 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp448.007.949.961 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp4.605.207.223; Aset Tetap (netto) sebesar Rp430.557.547.293; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp62.207.300; Aset Lainnya (netto) sebesar Rp12.782.988.145. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.274.429.518 dan Rp444.733.520.443.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2015		% thd Angg	TA 2014
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	9,113,280,000	10,577,067,174	116.06	7,619,471,966
JUMLAH PENDAPATAN		9,113,280,000	10,577,067,174	116.06	7,619,471,966
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	68,336,573,000	65,213,885,624	95.43	53,590,618,357
Belanja Barang	B.4	76,867,776,000	71,035,777,023	92.41	45,360,126,430
Belanja Modal	B.5	26,848,598,000	25,126,695,297	93.59	3,658,264,150
Belanja Bantuan Sosial	B.6	0	0	0	0
Jumlah Belanja Operasi		172,052,947,000	161,376,357,944	93.79	102,609,008,937
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.5.1	0	0	0	0
Belanja Peralatan dan Mesin	B.5.2	20,321,069,000	19,652,738,216	96.71	3,658,264,150
Belanja Gedung dan Bangunan	B.5.3	4,364,413,000	3,512,845,750	80.49	0
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.5.4	0	0	0.00	0
Belanja Modal lainnya	B.5.5	2,163,116,000	1,961,111,331	90.66	0
Jumlah Belanja Modal		26,848,598,000	25,126,695,297	93.59	3,658,264,150
JUMLAH BELANJA		172,052,947,000	161,376,357,944	93.79	102,609,008,937

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp10.340.638.828, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp156.268.943.771 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp155.451.618.509. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp218.477.060 dan defisit sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp144.892.502.621.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp436.517.365.710 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp144.892.502.621 kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai tahun berjalan sebesar Rp1.209.512.570; koreksi-koreksi senilai Rp860.678.014 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp151.038.466.770 dikurangi penurunan ekuitas Rp8.216.154.733 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp444.733.520.443.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NERACA (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2015 DAN PER 31 DESEMBER 2014

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	2,789,351,900	1,631,649,400
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	10,000,000	0
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	144,132,400	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.6	(720,662)	0
Piutang Lainnya	C.7	298,664,780	0
Persediaan	C.8	1,363,778,805	460,858,056
Jumlah Aset Lancar		4,605,207,223	2,092,507,456
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.9	62,519,900	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.10	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.11	(312,600)	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		62,207,300	0
ASET TETAP			
Tanah	C.12	215,715,732,396	215,554,860,396
Peralatan dan Mesin	C.13	177,882,634,951	163,329,168,856
Gedung dan Bangunan	C.14	197,222,679,198	193,952,010,548
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.15	11,170,483,797	11,182,670,697
Aset Tetap Lainnya	C.16	12,527,828,439	11,458,093,385
Konstruksi dalam pengerjaan	C.17	34,320,000	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.18	(183,996,131,488)	(170,697,865,610)
Jumlah Aset Tetap		430,557,547,293	424,778,938,272
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.19	9,078,456,505	8,170,142,625
Aset Lain-Lain	C.20	6,565,657,412	3,685,883,450
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.21	(2,861,125,772)	0
Jumlah Aset Lainnya		12,782,988,145	11,856,026,075
JUMLAH ASET		448,007,949,961	438,727,471,803
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.22	3,273,364,518	2,210,106,093
Uang Muka dari KPPN	C.23	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.24	1,065,000	0
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3,274,429,518	2,210,106,093
JUMLAH KEWAJIBAN		3,274,429,518	2,210,106,093
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	444,733,520,443	436,517,365,710
JUMLAH EKUITAS		444,733,520,443	436,517,365,710
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		448,007,949,961	438,727,471,803

III. LAPORAN OPERASIONAL

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	10,340,638,828	0
JUMLAH PENDAPATAN		10,340,638,828	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	64,997,923,073	0
Beban Persediaan	D.3	14,160,999,389	0
Beban Barang dan Jasa	D.4	35,715,773,889	0
Beban Pemeliharaan	D.5	6,161,416,029	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	15,361,403,477	0
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	19,053,069,390	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	1,033,262	0
JUMLAH BEBAN		155,451,618,509	0
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(145,110,979,681)	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(16,076,820)	0
Surplus/(Defisit) Pelepasan Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		234,618,500	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		64,620	0
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		218,477,060	0
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(144,892,502,621)	0
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(144,892,502,621)	0

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
EKUITAS AWAL	E.1	436,517,365,710	0
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(144,892,502,621)	0
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN			
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	1,209,512,570	0
Penyesuaian Nilai Kewajiban	E.4	0	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
Koreksi Nilai Persediaan	E.5	456,012,264	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.6	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.7	200,903,604	0
Lain-Lain	E.8	203,762,146	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.9	151,038,466,770	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.10	8,216,154,733	0
EKUITAS AKHIR	E.11	444,733,520,443	0

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Arsip Nasional Republik Indonesia

*Dasar Hukum**Entitas dan**Rencana**Strategis*

Sejarah Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia

Landarchief (1892- 1942)

Lembaga kearsipan di Indonesia, seperti yang kita kenal sekarang ini, secara de facto sudah ada sejak 28 Januari 1892, ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Landarchief*.

Pada tanggal tersebut dikukuhkan pula jabatan *landarchivaris* yang bertanggungjawab memelihara arsip-arsip pada masa VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan, serta membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan. Adapun *landarchivaris* pertama adalah Mr. Jacob Anne van der Chijs yang berlangsung hingga tahun 1905. Pengganti Mr. Jacob Anne van der Chijs adalah Dr. F. de Haan 1905 - 1922 yang hasil karya-karyanya banyak dipakai sebagai referensi bagi ahli-ahli sejarah Indonesia. Pengganti de Haan adalah E.C. Godee Molsbergen, yang menjabat dari tahun 1922 -1937. Pejabat *landarchivaris* yang terakhir pada masa Pemerintahan Hindia Belanda adalah Dr. Frans Rijndert Johan Verhoeven dari 1937 - 1942. Pada masa pergerakan nasionalisme kebangsaan di Indonesia, terutama pada tahun 1926-1929, Pemerintah Hindia Belanda berusaha menangkis dan menolak tuntutan Indonesia Merdeka. Dalam rangka penolakan tersebut, *Lansarchief* mendapat tugas khusus, yaitu: ikut serta secara aktif dalam pekerjaan ilmiah untuk penulisan sejarah Hindia Belanda, serta mengawasi dan mengamankan peninggalan-peninggalan orang Belanda. Pada tahun 1940-1942 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan *Arschief Ordonantie* yang bertujuan menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda, yang isinya antara lain :

1. Semua arsip-arsip pemerintah adalah hak milik tunggal pemerintah;
2. Batas arsip baru adalah 40 tahun;
3. Arsip-arsip yang melampaui masa usia 40 tahun diperlakukan

secara khusus menurut peraturan-peraturan tertentu diserahkan kepada *Algemeen Landarchief* di Batavia (Jakarta).

Kobunsjokan (1942-1945)

Masa pendudukan Jepang merupakan masa yang sepi dalam dunia kearsipan, karena pada masa itu hampir tidak mewariskan peninggalan arsip. Oleh karena itu, Arsip Nasional RI tidak memiliki khasanah arsip pada masa pendudukan Jepang. Lembaga Kearsipan yang pada masa Hindia Belanda bernama *Landarchief*, pada masa pendudukan Jepang berganti dengan istilah Kobunsjokan yang ditempatkan dibawah Bunkyojyoku. Sebagaimana pegawai-pegawai Belanda lainnya, sebagian pegawai Landarchief pun dimasukkan kamp tawanan Jepang. Meskipun demikian, pada masa tersebut posisi Landarchief sangat penting bagi orang-orang Belanda yang ingin mendapatkan keterangan asal-usul keturunannya. Keterangan dari arsip tersebut diperlukan untuk membebaskan diri dari tawanan Jepang, jika mereka dapat menunjukkan bukti turunan orang Indonesia meski bukan dari hasil pernikahan.

Arsip Negeri (1945-1947)

Secara yuridis, keberadaan lembaga kearsipan Indonesia dimulai sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Namun demikian tidak dipungkiri, bahwa keberadaan dan perkembangan Arsip Nasional RI merupakan hasil dari pengalaman kegiatan dan organisasi kearsipan pada masa pemerintah Kolonial Belanda (*landarchieff*) dan produk-produk kearsipannya. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga kearsipan (*landarchieff*) diambil oleh pemerintah RI dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, dan diberi nama Arsip Negeri. Keberadaan Arsip Negeri ini berlangsung sampai pertengahan tahun 1947 ketika pemerintah NICA datang ke Indonesia.

Landsarchieff (1947-1949)

Sejak Belanda melancarkan agresi militer yang pertama dan berhasil menduduki wilayah Indonesia di tahun 1947, keberadaan Arsip Negeri

diambil alih kembali oleh pemerintah Belanda. Nama Lembaga Arsip Negeri berganti lagi menjadi *landsarchief* kembali. Sebagai pimpinan *landsarchief* adalah Prof.W. Ph. Coolhaas yang menjabat hingga berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan diakuinya kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia oleh Belanda pada akhir tahun 1949. Setelah itu lembaga kearsipan kembali ketangan Pemerintah Republik Indonesia.

Arsip Negara (1950-1959)

Setelah Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949, Pemerintah Belanda melaksanakan pengembalian kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengembalian lembaga-lembaga pemerintah. Sebagaimana tahun 1945-1947, *landsarchief* ditempatkan kembali di bawah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Pada masa pengambilalihan *Landsarchief* oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat, masih diusahakan konsepsi asli tentang statusnya sebagai Arsip Negeri RIS. Hal tersebut dimaksudkan agar arsip-arsip pemerintah pusat dapat disalurkan ke Arsip Negeri RIS. Namun demikian konsep Arsip Negeri itu tidak bertahan lama. Pada tanggal 26 April 1950 melalui SK Menteri PP dan K nomor 9052/B, nama Arsip Negeri berubah menjadi Arsip Negara RIS. Sedangkan sebagai pimpinan lembaga Arsip Negara tersebut adalah Prof. R. Soekanto. Prof. R. Soekanto merupakan orang asli Indonesia yang pertama kalinya memimpin lembaga kearsipan Indonesia. Kepemimpinan Prof. R. Soekanto berlangsung selama enam tahun hingga tahun 1957. Sebagai penggantinya adalah Drs. R. Mohammad Ali, seorang sejarawan yang menulis buku Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Pergantian ini merupakan awal perubahan dasar dalam kepemimpinan di Arsip Negara, karena untuk pertama kalinya istilah Kepala Arsip Negara dipakai untuk jabatan tersebut. Nama Arsip Negara secara resmi dipakai hingga tahun 1959.

Arsip Nasional (1959-1967)

Arsip Nasional dibawah Kementerian PP dan K

Pada masa kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali diupayakan berbagai

usaha untuk meningkatkan peran dan status lembaga Arsip Negara. Langkah pertama yang diambil adalah memasukkan Arsip Nagara dalam Lembaga Sejarah pada Kementerian PP dan K. Perubahan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri nomor 130433/5, tanggal 24 Desember 1957. Berdasarkan SK menteri PP dan K nomor 69626/a/s nama Arsip Negara berganti menjadi Arsip Nasional. Perubahan ini berlaku surut semenjak 1 Januari 1959.

Arsip Nasional dibawah Kementerian Pertama RI (1961-1962)

Perubahan kelembagaan Arsip Nasional tidak berhenti sampai disitu. Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 215 tanggal 16 Mei 1961, penyelenggaraan segala urusan Arsip Nasional dipindahkan ke Kementerian Pertama RI, termasuk wewenang, tugas dan kewajiban, perlengkapan materiil dan personalia, serta hak-hak dan kewajiban keuangan dan lain-lain. Tugas dan Fungsi Arsip Nasional mengalami perluasan, sejak keluarnya Peraturan Presiden nomor 19 tanggal 26 Desember 1961 tentang Pokok-pokok Kearsipan Nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, tugas dan fungsi arsip Nasional tidak hanya menyelenggarakan kearsipan statis saja, akan tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan baru (dinamis).

Arsip Nasional dibawah Menteri Pertama Bidang Khusus. (1963-1964)

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.188 tahun 1962, Arsip Nasional RI ditempatkan di bawah Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus. Penempatan Arsip Nasional di Bidang Khusus dimaksudkan supaya arsip lebih diperhatikan, karena bidang ini khusus diperuntukkan bagi tujuan penelitian sejarah.

Arsip Nasional dibawah Menko Hubra (1963-1966)

Pada tahun 1964 nama Kementerian Pertama Bidang Khusus berganti menjadi Kementerian Kompartimen Hubungan dengan Rakyat (Menko Hubra). Perubahan tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasi kementerian-kementerian negara. Dengan bergantinya nama kementerian tersebut, otomatis Arsip Nasional berada di bawah kementerian yang baru tersebut. Dibawah kementerian ini,

Arsip Nasional mendapat tugas untuk melakukan pembinaan arsip. Namun demikian, perubahan tersebut tidak mempengaruhi tugas dan fungsi Arsip Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.19 tahun 1961.

Arsip Nasional dibawah Wakil Perdana Menteri Bidang Lembaga-lembaga Politik (1966-1967)

Berdasarkan Keputusan Wakil Perdana Menteri No.08/WPM/BLLP/KPT/1966, Arsip Nasional ditempatkan di bawah Waperdam RI bidang Lembaga-lembaga Politik. Namun secara fungsional, Arsip Nasional tetap memusatkan kegiatan-kegiatan ilmiah dan kesejarahan.

Arsip Nasional RI (1967- sekarang)

Tahun 1967 merupakan suatu periode yang sangat penting bagi Arsip Nasional, karena berdasarkan Keputusan Presiden 228/1967 tanggal 2 Desember 1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sementara anggaran pembelanjannya dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara. Penetapan Arsip Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen diperkuat melalui Surat Pimpinan MPRS No. A.9/1/24/MPRS/1967 yang menegaskan, bahwa Arsip Nasional sebagai aparat teknis pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945, bahkan merupakan penyempurnaan pekerjaan di bawah Presidium Kabinet. Dengan status baru tersebut, maka pada tahun 1968 Arsip Nasional berusaha menyusun pengajuan sebagai berikut;

1. Mengajukan usulan perubahan Arsip Nasional menjadi Arsip Nasional RI;
2. Mengajukan usulan perubahan Prps No.19/1961 menjadi Undang-undang tentang Pokok-pokok Kearsipan.

Usulan-usulan tersebut hingga masa berakhirnya kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali (1970) belum terlaksana. Oleh karena itu Dra. Sumartini, wanita pertama yang menjabat sebagai kepala Arsip Nasional, berjuang untuk melanjutkan cita-cita pemimpin sebelumnya. Atas usaha-usaha beliau, serta atas dukungan Menteri

Sekretaris Negara Sudharmono, SH, cita-cita dalam memajukan Arsip Nasional tercapai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971, yang kemudian dikenal dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Tiga tahun kemudian, berdasarkan Keputusan Presiden No.26 Tahun 1974 secara tegas menyatakan, bahwa Arsip Nasional diubah menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota RI dan langsung bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan keputusan tersebut, maka secara yuridis Arsip Nasional RI sah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 19 ayat (1) ANRI adalah lembaga kearsipan nasional yang wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan serta melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota dan arsip perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan lembaga terkait.

VISI ANRI

Sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, maka disusunlah visi pembangunan nasional 2015-2025 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Guna mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan nasional 2015-2019 yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sejalan dengan visi pembangunan nasional jangka menengah Tahun 2015-2019 tersebut, ANRI telah menetapkan visi perubahan pembangunan kearsipan Tahun 2015-2019, yaitu: “Arsip sebagai pilar *good governance* dan integrasi memori

kolektif Bangsa”

Adapun visi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2000-2025 adalah “*Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicapai pada Tahun 2025*”.

Arsip merupakan bukti dari dinamika sejarah perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Dalam arsip tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya dan harkat kebangsaan, yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

MISI ANRI

Dalam rangka mencapai Visi 2015-2019 “Arsip sebagai pilar *good governance* dan integrasi memori kolektif bangsa” ditempuh melalui 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat;
2. Mewujudkan pengelolaan arsip *asset* melalui pengembangan aplikasi *electronic records system*;
3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi;
4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan;
5. Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan;
6. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ANRI. Karena itu, ada 6 (enam) Misi atau langkah utama yang

kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi “Arsip sebagai Pilar *Good Governance* dan Integrasi Memori Kolektif Bangsa”. ANRI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kearsipan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, melibatkan peran serta masyarakat dan dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain. Misi pertama dan kedua tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan peran ANRI sebagai pengambil kebijakan (*policy maker*).

Agar sistem akses dan pelayanan arsip dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, maka diperlukan masukan dari hasil kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. Pemanfaatan arsip sebagai hasil dari pengelolaan arsip yang baik, tidak hanya terbatas sebagai bukti akuntabilitas dalam rangka menjamin transparansi penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga dapat melindungi, menyelamatkan, dan melestarikan arsip. Misi ketiga tersebut merupakan pelaksanaan peran sebagai *think tank* yang strategis, mengingat pengelolaan arsip yang andal dapat meningkatkan pemanfaatan arsip. Selain itu, hasil *think tank*, diharapkan dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan nasional. Jika peran sebagai *think tank* dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan citra (*brand image*) ANRI. Karena itu, peningkatan kualitas peran sebagai *think tank* merupakan bagian dari pembangunan citra lembaga (*organizational brand image building*).

Kemudian, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan pelaksanaan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan pencipta arsip dan lembaga kearsipan baik pusat dan daerah maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan koordinasi ini untuk mewujudkan sinergitas berkelanjutan antara ANRI dengan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

Adapun misi ANRI untuk mencapai visi ANRI Tahun 2000-2025 yaitu:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen

pemerintahan dan pembangunan.

2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi.
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah.
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Pencapaian Visi dan Misi tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai ANRI berikut:

1. Integritas
2. Profesional
3. Visioner
4. Sinergi
5. Akuntabel

TUJUAN ANRI

Dalam rangka mewujudkan visi dan untuk melaksanakan misi perubahan, maka tujuan pembangunan kearsipan ditetapkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional (T1);
2. Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional (T2);
3. Terwujudnya penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (T3);
4. Terwujudnya manajemen internal yang profesional dalam rangka mendukung tugas penyelenggaraan kearsipan nasional (T4).

Keempat tujuan strategis tersebut di atas mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam rangka mencapai tujuan akhir yaitu terwujudnya tertib arsip dinamis dan statis dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kearsipan nasional. Agar tujuan akhir dapat dicapai secara maksimal, maka harus ditunjang oleh aspek kelembagaan, organisasi, ketatalaksanaan, pengawasan dan SDM yang berkualitas serta didukung oleh sumber daya, sarana dan prasarana serta anggaran

yang memadai.

STRATEGI PEMBANGUNAN KEARSIPAN

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019, disusun strategi sebagai berikut:

1. Strategi Pencapaian Tujuan 1 Sasaran 1 (T1S1)

Untuk mencapai T1S1 yaitu terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional maka ditetapkan strategisebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan dan konsultasi (BIMKOS) kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri, ormas, orpol dan perseorangan melalui pengembangan mekanisme bimbingan dan konsultasi, ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung bimbingan dan konsultasi yang lebih komprehensif;
- b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan supervisi kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri, ormas, orpol dan perseorangan melalui pengembangan mekanisme supervisi, ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung supervisi yang lebih komprehensif serta peningkatan peran SDM secara partisipatif baik dari ANRI maupun dari instansi yang disupervisi;
- c) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan bagi semua komponen bangsa;
- d) Meningkatkan kualitas pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, lembaga dan unit kearsipan serta sertifikasi SDM kearsipan;
- e) Meningkatkan kualitas pengembangan jabatan fungsional Arsiparis.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip

yang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara.

Sasaran program ini adalah (a) meningkatnya kualitas pembinaan kearsipan; (b) meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan.

2. Strategi Pencapaian Tujuan 2 Sasaran 2 (T2S2)

Untuk mencapai T2S2 yaitu terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan analisis, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategi di bidang penyelamatan dan pelestarian arsip dan menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip dengan lembaganegara/lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
- b) Membuat standar minimal pengolahan arsip (deskripsi arsip) dari seluruh jenis media arsip baik yang konvensional maupun media baru dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses arsip statis yang diinginkan;
- c) Memberdayakan dan mengupayakan aksesibilitas arsip kepada publik dengan tersedianya *server storage* arsip statis hasil alih media arsip menjadi format digital yang memuat seluruh khazanah arsip statis yang tersimpan dan meningkatkan perawatan dan atau pemeliharaan arsip sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, dalam rangka mempertahankan kondisi fisik arsip, untuk melestarikan nilai guna arsip yang terkandung didalamnya;
- d) Meningkatkan promosi pemanfaatan arsip baik melalui penerbitan naskah sumber arsip maupun pameran arsip yang diselenggarakan untuk penyebaran informasi arsip kepada masyarakat dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak baik di lingkungan ANRI maupun di luar lingkungan ANRI dalam mengembangkan pemanfaatan arsip.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip

yang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara. Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas layanan kearsipan.

3. Strategi Pencapaian Tujuan 3 Sasaran 3 (T3S3)

Untuk mencapai T3S3 yaitu terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Memperoleh komitmen dan dukungan positif dari pimpinan lembaga penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b) Menyediakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang akan mendukung implementasi Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, baik di pusat jaringan nasional maupun di simpul jaringan;
- c) Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam jumlah memadai berdasarkan keahlian untuk mendukung tanggung jawab ANRI sebagai pusat jaringan nasional;
- d) Menyediakan prasarana dan sarana serta sumber daya pendukung lainnya melalui peningkatan peran serta masyarakat;
- e) Melakukan koordinasi yang efektif dengan unit kerja internal dan instansi terkait lainnya serta bekerja sama dengan organisasi kearsipan internasional dan lembaga kearsipan negara lain;
- f) Mengikuti tren perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kearsipan di dunia internasional dan menerapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip yang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara. Sasaran program ini adalah terkelolanya arsip dinamis dan statis.

4. Strategi Pencapaian Tujuan 4 Sasaran 4 (T4S4)

Untuk mencapai T4S4 mewujudkan birokrasi yang modern di ANRI, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan koordinasi secara terus-menerus dan menyeluruh

- dengan seluruh unit kerja dalam perencanaan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja;
- b) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh dengan seluruh unit kerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ANRI;
 - c) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh dengan seluruh unit kerja dalam pengelolaan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel;
 - d) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, hukum, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI;
 - e) Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan;
 - f) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM melalui diklat teknis kearsipan baik di dalam maupun luar negeri;
 - g) Meningkatkan promosi layanan Pusat Jasa Kearsipan secara terus menerus pada instansi pemerintah dan swasta;
 - h) Meningkatkan kualitas Pusat Jasa Kearsipan dalam pembenahan arsip di instansi pemerintah maupun swasta;
 - i) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh dengan seluruh unit kerja dalam hal pengawasan internal terhadap pengelolaan APBN, kepegawaian maupun perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian sasaran tersebut di atas dilakukan melalui:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan di bidang perencanaan program dan anggaran, administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI. Sasaran program ini adalah terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pengawasan intern.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ANRI. Sasaran program

ini adalah meningkatnya efektifitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip.

KERANGKA REGULASI

Di sini peran ANRI dalam penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang akan menjadi acuan dalam perumusan dan penetapan peraturan dan kebijakan kearsipan di lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten/kota maupun di unit kearsipan kementerian/lembaga serta melakukan pembinaan penyelenggaraan kearsipan kepada lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten/kota dan unit kearsipan kementerian/lembaga. Namun pembinaan kearsipan masih kurang efektif, karena belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012.

Di samping itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip, yang ditunjukkan dengan penyediaan NSPK untuk dapat diterapkan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam pengelolaan arsip. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan, serta belum optimalnya kualitas sumber daya manusia kearsipan. Masih terdapat ketidaksiharasan antara kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip berpotensi menghambat pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan.

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI mempunyai tugas pemerintahan dibidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;

- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian dan kearsipan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional;
- f. Pelindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional; dan
- g. Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.

Untuk lebih jelasnya, pembentukan kerangka regulasi Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pembinaan penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu melalui sistem kearsipan nasional. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang desain pembinaan kearsipan daerah, bidang kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta penjaminan sumber daya manusia kearsipan.
2. Terwujudnya pelindungan, penyelamatan, pengolahan, pelestarian dan akses arsip untuk kepentingan pemerintahan. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah pedoman pelindungan, pengamanan dan penyelamatan dokumen/arsip vital negara. Adapun kerangka regulasi yang akan dibentuk adalah sistem pengelolaan arsip dinamis dan statis; kriteria tanggung jawab; dan strategi pelindungan dan penyelamatan arsip.
3. Tercapainya peningkatan mutu dan efektifitas NSPK sistem kearsipan. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan produk hukum di lingkungan ANRI. Sedangkan yang akan dilaksanakan adalah menyusun kebijakan kearsipan nasional dengan melibatkan lembaga negara, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi dan BUMN/BUMD serta semua pihak terkait.
4. Tercapainya peningkatan mutu dan efektivitas penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah pedoman penyelenggaraan SIKN dan JIKN serta standar elemen data arsip dinamis dan statis untuk penyelenggaraan SIKN. Sedangkan,

kerangka regulasi yang akan dibentuk adalah penyempurnaan pedoman penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

KERANGKA KELEMBAGAAN

a. Organisasi

Dari sisi internal adalah revitalisasi organisasi untuk menciptakan organisasi yang efektif dan efisien, kaya fungsi, rasional, dan proporsional. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas, mengedepankan kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas, menerapkan strategi organisasi pembelajaran (*learning organization*) yang cepat beradaptasi dengan berbagai perubahan.

Dalam rangka penyelenggaraan kearsipan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, organisasi dan tata kerja ANRI telah mengalami perubahan dua kali dan terakhir dicabut dengan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.

Dari sisi eksternal baik dalam sistem administrasi pemerintahan maupun manajemen modern, manajemen kearsipan memiliki posisi dan peran yang sangat penting dan strategis, meskipun selama ini belum mendapat perhatian yang proposional dalam organisasi pemerintahan tingkat pusat dan daerah. Hal tersebut berpangkal dari kesadaran, jika dilihat arsip dari fisiknya bukan dari segi informasinya. Lemahnya urusan kearsipan pada organisasi pemerintahan pusat dan daerah dipengaruhi oleh tingkat kesadaran terhadap masalah arsip. Berpangkal dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahwa urusan kearsipan menjadi urusan wajib. Implikasinya adalah unit/lembaga kearsipan wajib dibentuk oleh setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun sampai saat masih terdapat lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD yang belum mempunyai unit kearsipan.

b. Katatalaksanaan

Di bidang ketatalaksanaan, arsip menjadi kunci kinerja organisasi. Penyelenggaraan kearsipan memiliki tujuan terlaksananya penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip

dinamis secara efektif dan efisien. Dengan demikian penyelenggaraan kearsipan dinamis memungkinkan suatu organisasi melaksanakan kegiatan yang mengarah pada pendokumentasian perumusan kebijakan, pelayanan serta proses pengambilan keputusan. Di samping itu, organisasi juga dapat memberikan perlindungan dan dukungan dalam perkara hukum termasuk manajemen risiko yang berkaitan dengan keberadaan atau penyediaan bukti kegiatan organisasi.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai amanat pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional;
- b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti sah;
- c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Sejalan dengan hal tersebut untuk mencapai tujuan sebagaimana

dimaksud di atas, sesuai amanat pasal 19 ayat (1) ANRI wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Disamping itu sesuai pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ANRI memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi. Dalam rangka pelaksanaan tugas seperti diamanatkan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bahwa lembaga pemerintah non kementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi ANRI sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09A Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Tsunami Aceh, ANRI mempunyai tugas pemerintahan dibidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,

U

keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian dan kearsipan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, ANRI mempunyai kewenangan:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kearsipan;
2. Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan;
4. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan;
 - b. Penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip.

ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dibantu oleh Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Deputi Bidang Konservasi Arsip, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan dan Inspektorat. Pelaksanaan tugas ANRI dilaksanakan oleh satuan-satuan organisasi tersebut di atas sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu:

1. Sekretariat Utama, melaksanakan tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI.

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat;
- b. Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum;
- c. Biro Umum.

2. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan nasional.

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan terdiri atas:

- a. Direktorat Kearsipan Pusat;
 - b. Direktorat Kearsipan Daerah I;
 - c. Direktorat Kearsipan Daerah II;
 - d. Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi.
3. Deputi Bidang Konservasi Arsip, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di bidang konservasi arsip secara nasional.
- Deputi Bidang Konservasi Arsip terdiri atas:
- a. Direktorat Akuisisi;
 - b. Direktorat Pengolahan;
 - c. Direktorat Preservasi;
 - d. Direktorat Layanan dan Pemanfaatan.
4. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi dan pengembangan Sistem Kearsipan Nasional.
- Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan terdiri dari:
- a. Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
 - b. Pusat Data dan Informasi;
 - c. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan.

Selain itu terdapat empat unit kerja Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan Inspektorat, dan Pusat Akreditasi Kearsipan dengan tugas sebagai berikut:

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kearsipan.
2. Pusat Jasa Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program di bidang jasa kearsipan.
3. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan ANRI.
4. Pusat Akreditasi Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan akreditasi kearsipan.

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan

u 
- 27 -

ANRI posisi per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

1. Kepala : Mustari Irawan
2. Sekretaris Utama : Sumrahyadi
3. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan : Andi Kasman
4. Deputi Bidang Konservasi Arsip : M. Taufik
5. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan : Dini Saraswati

Sumber daya manusia yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada ANRI posisi per 31 Desember 2015 adalah sebanyak 558 orang. Jumlah pegawai secara kualitas dan kuantitas dapat digambarkan sebagai berikut :

Pegawai ANRI Menurut Penempatan

NO	PENEMPATAN	JUMLAH	%
1.	PNS ANRI PUSAT	505	90.50
2.	PNS ANRI BOGOR	30	5.38
3.	PNS ANRI GAJAH MADA	2	0.36
4.	Balai Arsip Tsunami Aceh	8	1.43
5.	PNS ANRI yang dipekerjakan di luar ANRI	13	2.33
TOTAL		558	100,00

Pegawai ANRI Menurut Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH	%
1.	Jabatan Struktural	100	17.92
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	247	44.27
3.	Jabatan Fungsional Umum	211	37.81
TOTAL		558	100,00

Pegawai ANRI Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1.	Laki-laki	296	53.05
2.	Perempuan	262	46.95
TOTAL		558	100,00

Pegawai ANRI Menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	DOKTORAL (S3)	2	0.36
2.	PASCA SARJANA (S2)	80	14.34
3.	SARJANA (S-1)	284	50.90
4.	DIPLOMA IV	1	0.18
5.	DIPLOMA III	96	17.20
6.	DIPLOMA II	1	0.18
7.	SLTA	92	16.49
8.	SLTP	2	0.36
TOTAL		558	100.00

TARGET KINERJA

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, secara spesifik dijabarkan dalam tabel Sasaran dan Indikator Kinerja ANRI Tahun 2015-2019 sebagaimana terlampir.

Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015

A.2. Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015

Arsip Nasional Republik Indonesia mulai Tahun Anggaran 2015 untuk pertama kali mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam implementasi pertama ini, perlakuan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No.4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan tidak melakukan penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2014.
2. Arsip Nasional Republik Indonesia menyangdingkan Laporan Keuangan untuk periode 31 Desember 2015 dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 berbasis kas menuju akrual.
3. Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 2015 dan 2014

tersanding adalah bukan laporan keuangan komparatif. Pembaca Laporan keuangan diharapkan memahami bahwa penyandingan tersebut bukan perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis Laporan Keuangan lintas tahun.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Arsip Nasional Republik Indonesia menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia berupa penerimaan yang berasal dari :

- a) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah yang bersifat umum meliputi :
 - 1) Penerimaan Kembali Belanja yang berasal dari pengembalian belanja (pegawai, barang dan modal) dari tahun anggaran yang lalu;
 - 2) Jasa Giro yang berasal dari jasa lembaga keuangan (perbankan) pada tahun berjalan;
 - 3) Hasil penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak maupun dihapuskan dengan cara dijual melalui lelang;
 - 4) Pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (TP/TGR) yang berasal dari kewajiban oleh Bendahara maupun pegawai yang ditetapkan

berdasarkan SK Penetapan.

b) Penerimaan dari kegiatan pelayanan ANRI yang bersifat Fungsional pada :

1) Pusat Jasa Kearsipan menyelenggarakan pemberian jasa berupa:

- 1.1. Jasa pemeliharaan dan perawatan arsip meliputi menghilangkan asam, laminasi arsip (*leaf casting/lining system,encapsulation*), *rewashing film/micro film, recleaning video cassette* dan alih media;
- 1.2. Jasa Konsultansi/tenaga Ahli Kearsipan meliputi penataan kearsipan, layanan penataan *record centre* pusat dan pembuatan pedoman manual kearsipan untuk organisasi atau lembaga;
- 1.3. Jasa Penyimpanan arsip meliputi program aplikasi *storage* Sistem Kearsipan, Penyimpanan Arsip di *Record Centre* dan Pelayanan Peminjaman Arsip di *Record* Arsip.

2) Direktorat Pemanfaatan memberikan layanan jasa berupa:

- 2.1 Jasa penggandaan dan alih media meliputi foto copy arsip, foto copy referensi/Buku, Foto, *Print Out* mikrofilm ukuran A4, film, *scanning* arsip, alih media arsip kertas ke mikrofilm, reproduksi rekaman suara;
- 2.2 Naskah Sumber Arsip dan sumber-sumber Sejarah meliputi penerbitan naskah sumber periode sebelum Republik Indonesia (VOC-Belanda), Penerbitan Naskah Sumber Periode Republik Indonesia (1945-sekarang), bentuk elektronik;
- 2.3 Jasa Konsultansi/tenaga Ahli Kearsipan berupa penelusuran arsip dan penggandaan arsip.

3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan yang memberikan layanan jasa berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan meliputi diklat fungsional arsiparis dan diklat teknis kearsipan.

- 4) Biro Umum yang menyediakan layanan berupa jasa sewa ruangan pusdiklat dan jasa sewa gedung Gajah Mada.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan yang disajikan pada Laporan Operasional terdiri dari:

2.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan yang diperoleh ANRI berasal dari kelompok PNBP

Lainnya antara lain :

- a) Pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan peindahtanganan) serta pendapatan dari penjualan dengan akun 4231. Tahun Anggaran 2015 ANRI dari akun tersebut diperoleh pendapatan yang berasal dari :
 - Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya (423116) yang merupakan pendapatan hasil tugas fungsi pada direktorat pemanfaatan;
 - Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya (423129) yang diperoleh dari pendapatan hasil tugas fungsi Biro Umum;
- b) Pendapatan Jasa (4232), pendapatan ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu pendapatan jasa I (42321), pendapatan jasa II (42322) dan Pendapatan Jasa Lainnya (42329) dengan rincinan sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa I, ANRI memberikan jasa sehingga menghasilkan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing KL (423216) yang diberikan oleh

Pusat Jasa Kearsipan kepada pengguna/konsumen;

- Pendapatan Jasa II merupakan jasa lembaga perbankan berupa jasa giro (423221) yang dikelola para Bendahara satuan kerja ANRI pada Kantor Pusat, Dekonsentrasi dan Kantor Daerah.
 - Pendapatan Jasa Lainnya (423291) yakni pendapatan jasa yang dihasilkan oleh Pusat Jasa Kearsipan ANRI melalui jasa yang diberikan berupa jasa pemeliharaan dan perawatan arsip meliputi menghilangkan asam, laminasi arsip (*leaf casting/lining system, encapsulation*), *rewashing film/micro film, recleaning video cassette* dan alih media, jasa penyimpanan arsip meliputi program aplikasi *storage* Sistem Kearsipan, Penyimpanan Arsip di *Record Centre* dan Pelayanan Peminjaman Arsip di Record Arsip.
- c) Pendapatan Iuran dan Denda (4237) berasal dari pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah (423752).
- d) Pendapatan Lain-lain (4239) berasal dari pendapatan anggaran lain-lain (423999).

2.2 Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional ANRI Tahun 2015 berasal dari :

- a) Pendapatan lain-lain (4239) yang berasal dari pendapatan penyelesaian tuntutan ganti rugi Non Bendahara (423921), penerimaan kembali belanja pegawai TAYL (423951) dan penerimaan kembali belanja barang TAYL (423952).

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian. Dalam penerapan SAP berbasis akrual, penilaian ditetapkan berdasarkan metode harga pembelian terakhir untuk semua jenis persediaan;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
 - harga taksiran sesuai dengan Keputusan Kepala ANRI Nomor 150.A Tahun 2016 tanggal 14 April 2016 tentang penetapan nilai persediaan buku naskah sumber arsip pada ANRI Tahun 2016. Nilai taksiran ditentukan oleh tim penilai harga taksiran. Tim penilai harga

taksiran ditetapkan sesuai Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 149.A Tahun 2016 tanggal 12 April 2016 tentang Tim Penilai Harga Taksiran Buku Naskah Sumber Arsip pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2016.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. **Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo

dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi

Akuntansi

Pemerintah

Berbasis Akrua

Pertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan Atas Pos-

Pos Laporan

Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan terkait Pendapatan, Arsip Nasional Republik Indonesia tidak melakukan revisi, sementara terkait dengan belanja telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan belanja serta mempercepat pencapaian kinerja ANRI Tahun Anggaran 2015. Revisi Anggaran karena perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran disebabkan oleh :

- a) Adanya perubahan organisasi dan tata kerja;
- b) Penghematan anggaran perjalanan dinas/paket rapat fullboard

- atau meeting konsinyering ANRI Tahun 2015;
- c) Pergeseran anggaran antar keluaran;
 - d) Pergeseran anggaran antar jenis belanja;
 - e) Perubahan pengelola keuangan;
 - f) Kenaikan volume keluaran;
 - g) Penurunan volume keluaran;
 - h) Penambahan volume baru;
 - i) Pergeseran anggaran antar program untuk kebutuhan anggaran Tunjangan Kinerja.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi Pendapatan TA 2015

Uraian	2015	
	ESTIMASI PENDAPATAN AWAL	ESTIMASI PENDAPATAN STLH REVISI
Pendapatan Jasa terdiri dari :		
Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetak Lainnya	438,823,000	438,823,000
Pendapatan Pemindahtanganan BMN	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1,000,000,000	1,000,000,000
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	10,000,000	10,000,000
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing KL	500,000,000	500,000,000
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	6,000,000	6,000,000
Pendapatan Jasa Lainnya	7,082,457,000	7,082,457,000
Pendapatan Lain-lain terdiri dari :		
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	0
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	15,000,000	15,000,000
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	61,000,000	61,000,000
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
Jumlah Pendapatan	9,113,280,000	9,113,280,000

Sedangkan untuk anggaran belanja pegawai mengalami perubahan atau revisi terhadap Belanja Pegawai untuk tunjangan kinerja semula Rp27.270.197.000 menjadi Rp28.727.197.000 mengalami kenaikan sebesar Rp1.457.000.000 yang disebabkan adanya implementasi tarif baru (*grade*) untuk kelas jabatan bagi penerima tunjangan kinerja. Belanja Gaji dan Tunjangan mengalami penurunan pagu anggaran

f

u

sebesar Rp300.000.000, pagu anggaran semula Rp39.575.846.000 menjadi Rp39.275.846.000. Pada kelompok belanja barang, pagu anggaran belanja barang hampir semua mengalami revisi, ini diakibatkan adanya kebijakan pembatasan kegiatan perjalanan dinas, paket rapat luar kota, perubahan struktur organisasi. Pagu anggaran belanja barang semula Rp81.716.378.000 menjadi Rp76.799.176.000 atau mengalami penurunan anggaran sebesar Rp4.917.202.000. Revisi pagu anggaran belanja disajikan pada tabel sebagai berikut :

Rincian Anggaran Belanja TA 2015

Uraian	2015	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja		
<i>Belanja Pegawai terdiri dari :</i>		
Belanja Gaji dan Tunjangan	39,575,846,000	39,275,846,000
Belanja Lembur	333,530,000	333,530,000
Belanja Tunjangan Khusus	27,270,197,000	28,727,197,000
Belanja Pegawai Transito	1,157,000,000	-
Jumlah Belanja Pegawai	68,336,573,000	68,336,573,000
<i>Belanja Barang terdiri dari :</i>		
Belanja Barang Operasional	7,099,338,000	6,989,172,000
Belanja Barang Non Operasional	21,672,707,000	28,665,811,000
Belanja Barang Persediaan	-	944,864,000
Belanja Jasa	14,232,716,000	17,018,074,000
Belanja Pemeliharaan	6,115,608,000	6,110,812,000
Belanja Perjalanan Dinas DN	29,891,189,000	16,260,328,000
Belanja Perjalanan Dinas LN	2,704,820,000	878,715,000
Jumlah Belanja Barang	81,716,378,000	76,867,776,000
<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	0	0
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	0	0
<i>Belanja Modal terdiri dari :</i>		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,339,446,000	20,321,069,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14,520,000,000	4,364,413,000
Belanja Modal Lainnya	1,140,550,000	2,163,116,000
Jumlah Belanja Modal	21,999,996,000	26,848,598,000

Sedangkan apabila dilihat dari program, Arsip Nasional Republik Indonesia maka perubahannya adalah sebagai berikut:

PROGRAM	2015	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ANRI	107,101,984,000	107,101,984,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	19,000,000,000	19,000,000,000
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	45,950,963,000	45,950,963,000
Total Belanja	172,052,947,000	172,052,947,000

Realisasi Pendapatan **B.1 Pendapatan**

Rp10.577.067.174

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp10.577.067.174 atau mencapai 116,06 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp9.113.280.000. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Arsip Nasional RI adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2015		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Pendapatan
Pendapatan Jasa terdiri dari :	9,037,280,000	10,377,983,476	114.84
Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	438,823,000	407,726,800	92.91
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya	-	14,700,000	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1,000,000,000	1,599,036,000	159.90
Pendapatan dari pemanfaatan BMN Lainnya	10,000,000	0	0
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi sesuai dengan Tugas dan Fungsi Masing-masing KN/L	500,000,000	513,775,800	102.76
Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	-	5,155	
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	6,000,000	80,683	1.34
Pendapatan Jasa Lainnya	7,082,457,000	7,797,363,500	110.09
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	45,295,538	0

Uraian	2015		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Pendapatan
Pendapatan Lain-lain terdiri dari :	76,000,000	199,088,853	261.96
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	27,966,200	0
Pendapatan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	15,000,000	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	61,000,000	161,469,756	264.70
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	67,700	0
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	9,585,197	0

Realisasi Pendapatan TA 2015 untuk pendapatan jasa melebihi dari estimasi pendapatan disebabkan semua kontrak kerja penyelesaiannya secara tepat waktu dan tidak ada tunggakan pembayaran dari pihak ketiga, sedangkan pendapatan lain-lain realisasinya melebihi dari estimasi pendapatan yang direncanakan dikarenakan adanya peningkatan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL. Selanjutnya, Realisasi Pendapatan untuk periode TA 2015 dibandingkan dengan TA 2014 secara keseluruhan terdapat kenaikan sebesar 38,82 %. Pada Pendapatan Jasa mengalami kenaikan dikarenakan adanya peningkatan pendapatan dari pendapatan pemanfaatan BMN dan pendapatan jasa namun pada pendapatan lain-lain mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena penerimaan kembali belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sudah dilaksanakan secara optimal seiring dengan kecermatan pembayaran belanja pegawai.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
TA 2015 dan 2014*

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	10,377,978,321	7,319,396,003	41.79
Pendapatan Lain-lain	199,088,853	300,075,963	(33.65)
Jumlah	10,577,067,174	7,619,471,966	38.82

*Realisasi Belanja
Rp163.096.778.801*

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Arsip Nasional Republik Indonesia untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 94,79% atau Rp163.096.778.801 dari anggaran belanja sebesar Rp172.052.947.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 tersaji sebagai berikut:

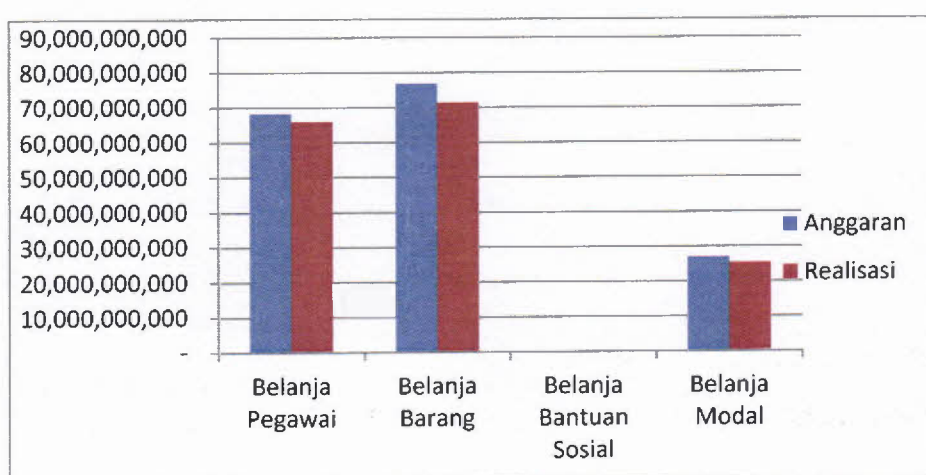
f

u

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	68,336,573,000	66,089,098,501	96.71
Belanja Barang	76,867,776,000	71,880,985,003	93.51
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00
Belanja Modal	26,848,598,000	25,126,695,297	93.59
Total Belanja Kotor	172,052,947,000	163,096,778,801	94.79
Pengembalian Belanja	-	(1,642,116,857)	
Total Belanja	172,052,947,000	161,454,661,944	93.84

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Berdasarkan Program TA 2015

PPROGRAM	2015		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ANRI	107,101,984,000	103,450,796,087	96.59
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	19,000,000,000	17,939,688,000	94.42
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	45,950,963,000	41,706,294,714	90.76
Total Belanja Kotor	172,052,947,000	163,096,778,801	94.79
Pengembalian Belanja		(1,642,116,857)	
Total Belanja	172,052,947,000	161,454,661,944	93.84

Realisasi Belanja TA 2015 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 56,91% dibandingkan pada TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 21,55% atau Rp 11.716.628.154 yang disebabkan oleh implementasi Keputusan Presiden No. 121 Tahun 2015 terkait perubahan grade/kelas jabatan tunjangan kinerja pegawai ANRI (Kenaikan Tunjangan Kinerja);
2. Realisasi belanja barang mengalami kenaikan sebesar 56,58% Rp 25.975.270.463 sebagai akibat dari meningkatnya kapasitas dan volume implementasi penyelenggaraan kearsipan nasional serta layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ANRI;
3. Realisasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 586,85% atau Rp21.468.431.147 disebabkan peningkatan kebutuhan sarana dan prasana dalam rangka penyelenggaraan kearsipan nasional guna tercapainya rencana kerja strategis serta visi dan misi ANRI.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	66,089,098,501	54,372,470,347	21.55
Belanja Barang	71,880,985,003	45,905,714,540	56.58
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Belanja Modal	25,126,695,297	3,658,264,150	586.85
Jumlah	163,096,778,801	103,936,449,037	56.92


*Belanja Pegawai
Rp66.089.098.501*

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp66.089.098.501 dan Rp54.372.470.347 atau terjadi kenaikan sebesar 21,55% atau Rp11.716.628.154 dari Tahun Anggaran yang lalu. Kenaikan ini disebabkan implementasi Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2015 yang memberlakukan kenaikan tarif kelas jabatan tunjangan kinerja pegawai ANRI sejak bulan Mei 2015, kenaikan pangkat dan golongan pegawai ANRI, penambahan struktur organisasi di lingkungan ANRI.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	37,125,911,051	33,169,968,747	11.93
Beban Uang Lembur	250,347,000	278,971,000	(10.26)
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan	28,712,840,450	20,923,530,600	37.23
Beban Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	66,089,098,501	54,372,470,347	21.55
Pengembalian Belanja Pegawai	(875,212,877)	(781,851,990)	11.94
Jumlah Belanja	65,213,885,624	53,590,618,357	21.69

u 
- 46 -

Belanja Barang

Rp71.880.985.003

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp71.880.985.003 dan Rp45.905.714.540. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp25.975.270.463 atau 56,78% dari Realisasi Belanja Barang TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan belanja dalam rangka menunjang program penyelenggaraan kearsipan nasional dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	6,365,386,959	4,600,557,685	38.36
Belanja Barang Non Operasional	26,619,850,822	11,695,050,534	127.62
Belanja Persediaan	929,909,450	0	0
Belanja Jasa	15,833,141,093	10,467,011,089	51.27
Belanja Pemeliharaan	6,087,325,035	3,123,000,562	94.92
Belanja Perjalanan Dalam Negeri dan Luar Negeri	16,045,371,644	16,020,094,670	0.16
Jumlah Belanja Kotor	71,880,985,003	45,905,714,540	56.58
Pengembalian Belanja	(766,903,980)	(545,588,110)	40.56
Jumlah Belanja	71,114,081,023	45,360,126,430	56.78

Belanja Modal

Rp25.126.695.297

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp25.126.695.297 dan Rp3.658.264.150. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp21.468.431.147 atau 586,85% dibandingkan TA 2014 disebabkan oleh adanya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,652,738,216	2,641,249,000	644.07
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,512,845,750	169,957,150	1966.90
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	1,961,111,331	847,058,000	131.52
Jumlah Belanja Kotor	25,126,695,297	3,658,264,150	586.85
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	25,126,695,297	3,658,264,150	586.85

Belanja Modal Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal tanah adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp19.652.738.216

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp19.652.738.216 dan Rp2.641.249.000. Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp17.011.489.216 atau 644,07 % dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh penambahan perangkat komputer dan fasilitas pendukungnya.

U

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,652,738,216	2,641,249,000	644.07
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	19,652,738,216	2,641,249,000	644.07
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah Belanja	19,652,738,216	2,641,249,000	644.07

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp3.512.845.750

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp3.512.845.750 dan Rp169.957.150. Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp3.342.888.600 atau 1966,90% dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2014. Hal ini disebabkan adanya pelaksanaan proses penyelesaian pembangunan, rehabilitasi maupun renovasi gedung dan bangunan di lingkungan ANRI.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2015	T.A. 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,512,845,750	169,957,150	1,966.90
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	3,512,845,750	169,957,150	1,966.90
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	3,512,845,750	169,957,150	1,966.90

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp375.538.000. Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2014.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2015	T.A 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	375,538,000	-100.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	375,538,000	(100)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	375,538,000	(100)

*Belanja Modal Lainnya
Rp1.961.111.331*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.961.111.331 dan Rp471.520.000. Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp1.489.591.331 atau 315,91% dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2014. Hal ini disebabkan adanya pengadaan software, pembuatan film visualisasi pengelolaan arsip statis, pembuatan aplikasi pengelolaan arsip aktif, aplikasi keamanan arsip statis, aplikasi E-performance data kinerja, aplikasi pameran kelembagaan, sistem informasi kepegawaian, aplikasi system sertifikasi arsiparis, pembuatan Lisensi Keamanan Data Online, pembuatan website, dan alih media buku yang mendukung program penyelenggaraan kearsipan nasional.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2015	T.A 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	1,961,111,331	471,520,000	315.91
Jumlah Belanja Kotor	1,961,111,331	471,520,000	315.91
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	1,961,111,331	471,520,000	315.91

Belanja Bantuan Sosial Rp.0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Belanja Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2015 dan 2014**

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Sekretariat Utama	0	0	0.00
Penerima Bantuan melalui Deputi Pembinaan Kearsipan	0	0	0.00
Penerima Bantuan melalui Deputi Konservasi Arsip	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

**Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2015 dan 2014**

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
BP ANRI Jakarta (450448)	0	0
BP BATA (681464)	0	0
BP pada Satker Penerima Dana Dekonsentrasi	0	0
Jumlah	0	0

Pada Neraca LK ANRI TA 2015 (*Unaudited*), terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan uang sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran Satker BAD Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp29.704.000 dan Bendahara Pengeluaran Satker Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua sebesar Rp48.600.000. Sesuai dengan Surat nomor S-1883/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang perpanjangan batas waktu pengesahan dan penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan untuk penyusunan LKKL dan LKBUN *Audited* TA 2015, satker BAD Kalimantan Timur dan Papua melakukan proses penyampaian dokumen pertanggungjawaban transaksi keuangan GUP




Nihil pada tanggal 18 Maret 2016. Adapun dokumen pertanggungjawaban transaksi keuangan yang disampaikan sebagai berikut :

No.	Tgl.SPM/SP2D	Nomor SPM/SP2D	Akun	Rupiah
BAD Kalimantan Timur				
1	31/12/2015	00013/150461701003778	521211	1.354.000
			521213	5.250.000
			522151	1.500.000
			524114	21.600.000
Total				29.704.000
BAD Papua				
1	31/12/2015	00012/150631701003251	522151	6.600.000
			524114	42.000.000
Total				48.600.000

Dengan melakukan penyampaian SPM tersebut diatas, pertanggungjawaban atas uang UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran kedua satker pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp0, dan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tingkat Kementerian/Lembaga juga menjadi Rp0.

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan untuk periode tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar masing-masing Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2015 dan 2014*

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp2.789.351.900*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp2.789.351.900 dan Rp1.631.649.400. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya

dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2015 dan 2014**

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Uang Tunai di Brankas Bendahara Pengeluaran ANRI Jakarta (450448)	0	0
Uang di Rekening Bank (BPG 139 ANRI No.Rek. 127-00-8800618-2)	2,789,351,900	0
Uang di Rekening Bank (BPN 139 ANRI No.Rek. 127-00-0480768-9)	0	0
Tunjangan Kinerja Desember 2014 yg belum didistribusikan kepada Pegawai ANRI pada satker ANRI Jakarta (450448)	0	1,631,649,400
Jumlah	2,789,351,900	1,631,649,400

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Rekening Bendahara Pengeluaran yang berasal dari LS tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2015 sebesar Rp2.417.651.900 dan LS uang makan pegawai bulan Desember 2015 sebesar Rp283.720.000 yang belum didistribusikan pada pegawai ANRI.

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp10.000.000*


C.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp10.000.000 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Pendapatan yang Masih Harus Diterima berasal dari pendapatan atas sewa gedung dan bangunan ANRI yang dilakukan oleh Koperasi ANRI (Kopanri) dan Kafe Kopanri yang belum dipungut dan disetorkan ke Kas Negara. Penerimaan tersebut diterima dan disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 20 Januari 2016 sesuai dengan nomor NTPN FAF5F10Q52096HS8 dengan total setoran sebesar Rp10.000.000.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp144.132.400*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp144.132.400 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan

M 
- 53 -

jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

**Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR
TA 2015 dan 2014**

No	Nama	Tahun 2015	Tahun 2014
1	Bagian Lancar TP	0	0
2	Bagian Lancar TGR	144,132,400	0
Jumlah		144,132,400	0

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi berasal dari tagihan pengembalian uang pemberian bantuan pendidikan bagi PNS ANRI Tahun 2014 sesuai dengan LHP BPK RI Nomor 125C/HP/XVI/05/2015 tanggal 22 Mei 2015, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Penetapan dan SKTJM. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Audited mengalami mutasi debit sebesar Rp5.600.000.


*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih -
Piutang Lancar
Rp720.662*

C.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp720.662 dan Rp0. Penyisihan piutang tak tertagih - Piutang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut :

**Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih
- Piutang Jangka Pendek TA 2015**

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0	0.50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	144,132,400	0.50%	720,662
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
Jumlah	144,132,400		720,662
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0.50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tak	144,132,400		720,662

4 
- 54 -

Piutang Lainnya
Rp298.664.780

C.7 Piutang Lainnya

Saldo piutang lainnya berasal dari temuan pemeriksaan BPK RI atas kelalaian pembayaran :

- Belanja pegawai terhadap pegawai yang cuti sakit, cuti bersalin, cuti besar, dan tugas belajar yang belum dipotong tunjangan kinerja dan uang makan;
- Belanja barang dan jasa terhadap biaya perjalanan dinas dan honor kegiatan. Adapun rincian piutang lainnya sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang Lainnya TA 2015 dan 2014

Jenis	TH 2015	TH 2014
Kurang Potong Tunjangan Kinerja Tahun 2015 atas pegawai yang cuti sakit	24,847,415	0
Kurang Potong Tunjangan Kinerja Tahun 2015 atas pegawai yang cuti bersalin	6,499,833	0
Kurang Potong Tunjangan Kinerja Tahun 2015 atas pegawai yang cuti besar	3,780,355	0
Kurang Potong Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Tahun 2015 atas pegawai yang tugas belajar	1,659,750	0
Kelebihan pembayaran honor kegiatan tahun 2015 yang dibayarkan tahun 2016	4,802,500	0
Kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri tahun 2015 yang dibayarkan tahun 2016	26,760,132	0
Kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri tahun 2015 yang dibayarkan tahun 2016	26,009,355	0
Kelebihan pembayaran honor pengelola APBN TA 2015	47,900,000	0
Kurang setor PPh ps.21 atas honor tim pelaksana kegiatan Tahun 2015	1,065,000	0
Kelebihan pembayaran honor kegiatan Tahun 2015	85,452,500	0
Kelebihan pembayaran honor kegiatan di Pusat Jasa Tahun 2015	62,135,000	0
Kurang volume pekerjaan atas belanja pemeliharaan tahun 2015	7,752,940	0
Jumlah	298,664,780	0

Persediaan
Rp1.363.778.805

C.8 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Akun belanja yang menghasilkan penambahan nilai persediaan di ANRI bukan hanya dari belanja barang persediaan konsumsi (521811) akan tetapi berasal dari beberapa akun belanja sebagai berikut:

No	Akun Persediaan	Uraian Akun	Nilai (Rp)
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	389,383,000
2	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	938,304,900
3	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	49,150,000
4	521119	Belanja Barang Oprasional Lainnya	195,720,000
5	521211	Belanja Bahan	12,137,653,808
6	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	68,580,150
JUMLAH			13,778,791,858

Nilai Persediaan *audited* untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp1.363.778.805 dan Rp460.858.056 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2015 dan 2014

Akun Persediaan	Persediaan	TH 2015	TH 2014
117311	Barang Konsumsi	710,880,950	403,085,735
117113	Barang untuk Pemeliharaan	36,698,890	17,625,600
117114	Barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	425,596,424	-
117131	Bahan Baku	159,485,816	8,201,950
117199	Persediaan Lainnya	31,116,725	31,944,771
Jumlah		1,363,778,805	460,858,056

Nilai Persediaan hasil audit terdapat koreksi mutasi debit maupun koreksi mutasi kredit yang berasal dari :

a) Mutasi debit

- Beban BBM RFID yang belum tercatat senilai Rp155.117.816;
- Nilai buku yang dijual ke masyarakat belum tercatat dalam aplikasi persediaan senilai Rp425.596.424;
- Hasil penilaian atas BMN Rp1,00 yang belum masuk dalam persediaan senilai Rp30.415.840;

b) Mutasi kredit

- Kelebihan catat persediaan paket peraturan Kepala ANRI senilai Rp1.397.200;
- Hasil inventarisasi fisik persediaan barang pecah belah per 31 Desember 2015 senilai Rp184.800;
- Persediaan obat dan alat kesehatan yang disajikan dengan harga terlalu tinggi pada saat saldo akhir persediaan per 31 Desember 2015 senilai Rp7.832.046.

*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp62.519.900*

C.9 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp62.519.900 dan Rp0. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Piutang Tagihan TP /TGR TA 2015 dan 2014

Jenis Tagihan	TA 2015	TA 2014
Piutang Tagihan TP	0	0
Piutang Tagihan TGR	62,519,900	0
Jumlah	62,519,900	0

Piutang tagihan TGR dilakukan reklasifikasi mutasi kredit karena kelebihan senilai Rp5.600.000 pada penyajian piutang jangka panjang.

*Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0*

C.10 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp312.600*

C.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp312.600 dan Rp0. Penyisihan piutang tak tertagih-piutang jangka panjang pada ANRI dikategorikan lancar dengan tarif 0,50 persen.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan

4 f
- 57 -

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2015

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	62,519,900	0.50%	312,600
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
Jumlah	62,519,900		312,600
Tagihan PA			
Lancar	0	0.50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	62,519,900		312,600

Tanah

Rp215.715.732.396

C.12 Tanah

Tanah yang dimiliki Arsip Nasional RI untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 215.715.732.396 dan Rp215.554.860.396. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	Rp 215,554,860,396
Mutasi tambah:	
Tanah Persil 4000m2	Rp 160,872,000
Hibah	Rp -
Mutasi kurang:	Rp -
Penghentian aset dari penggunaan	Rp -
Penghapusan	Rp -
Saldo per 31 Desember 2015	Rp 215,715,732,396
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp 215,715,732,396

Aset tetap berupa tanah terjadi mutasi debit seluas 4.000m2 atau senilai Rp160.872.000 yang merupakan transfer masuk dari Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara berupa sebagian tanah di Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar sesuai sertipikat (tanda bukti hak) Tanah Hak Pakai No.0004 Tahun 2015.

Adapun rincian aset ANRI berupa tanah sebagai berikut :

- 1) Tanah di jalan Gajah Mada seluas 9.340 m2 senilai Rp111.146.000.000;

- 2) Tanah di jalan Ampera Raya seluas 18.245 m² senilai Rp72.980.000.000;
- 3) Tanah Pusdiklat Kearsipan ANRI di Bogor seluas 3.371 m² senilai Rp25.042.860.000;
- 4) Tanah rumah negara golongan II di Ragunan Jakarta seluas 979 m² senilai Rp3.819.200.396;
- 5) Tanah jalan khusus kompleks rumah negara seluas 793 m² senilai Rp2.566.800.000;
- 6) Tanah Balai Arsip Tsunami Aceh di Aceh seluas 4.000 m² senilai Rp160.872.000 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.6/WKN.01/KNL.01/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Arsip Nasional Republik Indonesia cq. Balai Arsip Tsunami Aceh.

C.13 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp177.882.634.951

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp177.882.634.951 dan Rp163.329.168.856. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	TH 2015 (UNAUDITED)	KOREKSI (DEBET)	KOREKSI (KREDIT)	TH 2015 (AUDITED)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	163,329,168,856			163,329,168,856
Mutasi tambah:				
Pembelian	10,361,928,866	-	-	10,361,928,866
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	9,674,200,000	-	-	9,674,200,000
Reklasifikasi Masuk	8,074,000	-	-	8,074,000
Reklasifikasi dari Intra ke Extra	136,741,979	-	-	136,741,979
Pengembangan Nilai Aset	5,905,000	-	-	5,905,000
Koreksi Pencatatan	-	272,910,000	-	272,910,000
Mutasi kurang:				
Penghentian aset dari penggunaan	2,936,570,588	-	2,879,773,962	5,816,344,550
Penghapusan	76,870,200	-	-	76,870,200
Reklasifikasi Keluar	8,074,000	-	-	8,074,000
Koreksi Pencatatan	-	-	5,005,000	5,005,000
Saldo per 31 Desember 2015	180,494,503,913	272,910,000	(2,884,778,962)	177,882,634,951
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(144,515,282,564)	2,833,390,886		(141,681,891,678)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	35,979,221,349	3,106,300,886	(2,884,778,962)	36,200,743,273

Mutasi debet diperoleh dari pembelian 1.082 buah yang terdiri dari alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat komputer, server dan kendaraan bermotor roda empat.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2015 disajikan pada CaLBMN.

Rincian Mutasi Pembelian Peralatan dan Mesin

Kelompok Barang	Intrakomptable	
	Kuantitas	Nilai (Rp)
Alat angkutan darat bermotor	12	2,614,215,000
Alat angkutan darat tak bermotor	10	16,850,000
Alat Bengkel tak Bermesin	1	1,726,450
Alat Ukur	27	50,625,000
Alat Kantor	153	743,052,600
Alat Rumah Tangga	351	1,355,251,136
Alat Studio	79	448,312,500
Alat Komunikasi	30	38,240,000
Peralatan Pemancar	2	13,000,000
Unit Alat Laboratorium	3	77,450,000
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	6	53,100,000
Alat Khusus Kepolisian	8	47,550,000
Komputer Unit	229	3,245,258,400
Peralatan Komputer	185	1,798,759,280
Alat Kerja Penerbangan	4	1,200,000
Unit Peralatan Proses/Produksi	17	130,248,500
Total	1,117	10,634,838,866



Rincian Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP

Kelompok Barang	Intrakomptable	
	Kuantitas	Nilai (Rp)
Alat Ukur	10	231,000,000
Akat Kantor	10	125,400,000
Alat Rumah Tangga	1	197,100,000
Alat Studio	1	1,298,000,000
Peralatan Pemancar	5	236,500,000
Unit Alat Laboratorium	1	15,400,000
Alat Khusus Kepolisian	1	115,500,000
Komputer Unit	1	15,400,000
Peralatan Komputer	7	7,439,900,000
Total	37	9,674,200,000

Penyelesaian pembangunan dengan KDP berasal dari pembelian peralatan dan mesin yang pembayarannya dua tahap dan pembayarannya dilakukan berbeda sehingga dicatat dengan menu transaksi KDP dengan menggunakan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 9.674.200.000.

Rincian Reklasifikasi Masuk

Kelompok Barang	Intrakomptable	
	Kuantitas	Nilai (Rp)
Alat Rumah Tangga	1	8,074,000
Total	1	8,074,000

Perolehan Reklasifikasi masuk berupa alat pemanas air di Satker BATA.

Rincian Perolehan Reklasifikasi dari Intrakomptable ke Extrakomptable

Kelompok Barang	Intrakomptable	
	Kuantitas	Nilai (Rp)
Alat Kantor	5	6,597,323
Alat Rumah Tangga	27	61,461,900
Unit Alat Laboratorium	1	600,000
Alat Kerja Penerbangan	1	68,082,756
Total	34	136,741,979

Perolehan Reklasifikasi dari Intrakomptable ke extrakomptable berasal dari peralatan dan mesin yang disebabkan oleh penilaian terhadap BMN bernilai Rp1.

Pengembangan Nilai Aset


Kelompok Barang	Intrakomptable	
	Kuantitas	Nilai (Rp)
Alat Rumah Tangga	0	5,005,000
Alat angkutan darat tak bermotor	0	900,000
Total	0	5,905,000

Pengembangan nilai aset berupa penambahan komponen computer unit milik Deputi IPSK Rp900.000 dan AC Sentral di Satker BATA Rp5.005.000.

Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan

Kelompok Barang	Intrakomptable	
	Kuantitas	Nilai (Rp)
UNAUDITED		
Alat Kantor	58	762,216,108
Alat Rumah Tangga	53	232,244,279
Alat Studio	9	302,315,611
Alat Komunikasi	20	16,204,665
Komputer Unit	90	1,462,809,491
Peralatan Komputer	17	160,780,434
Total	247	2,936,570,588
AUDITED		
Alat Kantor	76	1,039,804,946
Alat Rumah Tangga	96	334,035,836
Alat Studio	14	970,452,334
Alat Komunikasi	20	16,204,665
Unit Alat Laboratorium	2	1,580,092,844
Komputer Unit	102	1,688,793,491
Peralatan Komputer	24	186,960,434
Total	334	5,816,344,550

Penghentian aset dari penggunaan berasal dari penghapusan BMN yang tidak dapat digunakan lagi dikarenakan rusak berat dengan cara dijual/dilelang pada tahun 2015 berdasarkan Surat keputusan Kepala


 N - 61 -

Arsip Nasional RI Nomor 348.A Tahun 2015 tentang Penghapusan BMN di lingkungan ANRI senilai Rp2.936.570.588 dan tambahan koreksi nilai audit BPK senilai Rp2.879.773.962, sehingga total nilai penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp5.816.344.550.

Penghapusan Barang Milik Negara

Kelompok Barang	Intrakomptable	
	Kuantitas	Nilai (Rp)
Alat Kantor	0	0
Komputer Unit	30	27,370,200
Peralatan Komputer	50	49,500,000
Unit Peralatan Proses/Produksi	0	0
Total	80	76,870,200

Penghapusan berasal dari barang-barang persediaan pakai habis yang dicatat sebagai aset tetap (peralatan dan mesin) sehingga diperlukan dari daftar inventaris ANRI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 346 Tahun 2015 tentang Penghapusan BMN.

Terdapat Reklasifikasi Keluar karena adanya penyesuaian penggolongan barang, yaitu perubahan kodefikasi aset di satker BATA yang semula berupa alat studio senilai Rp8.074.000 atau 1 unit menjadi alat rumah tangga.


Saldo akhir aset tetap berupa Peralatan dan Mesin terdapat koreksi mutasi debit senilai Rp272.910.000 dan mutasi kredit senilai Rp2.884.778.962. Koreksi mutasi debit senilai Rp272.910.000 berasal dari kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja barang yakni belanja pemeliharaan. Sedangkan koreksi mutasi kredit senilai Rp2.884.778.962 berasal dari reklasifikasi aset rusak senilai Rp2.879.773.962 yang masih terdapat pada aset tetap yang seharusnya pada aset lain-lain dan koreksi hasil kapitalisasi timer AC Satker BATA senilai Rp5.005.000.

*Gedung dan
Bangunan Rp
197.222.679.198*

C.14 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp197.222.679.198 dan Rp193.952.010.548.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

u 
- 62 -

Saldo per 31 Desember 2014	193,952,010,548
Mutasi tambah:	
Penyelesaian dengan KDP	208,964,000
Pengembangan Nilai Aset	248,265,750
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	12,186,900
Kapitalisasi beban pemeliharaan	36,300,000
Pengembangan dengan Nilai KDP	2,764,952,000
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2015	197,222,679,198
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	37,385,415,907
Nilai Buku per 31 Desember 2015	159,837,263,291

Mutasi debit berupa pengembangan nilai aset yang berasal dari sbb :

1. Penyelesaian pembangunan terhadap Gedung Pos Jaga Permanen di Gedung Gajah Mada yang berasal dari belanja modal gedung dan bangunan dicatat di aplikasi BMN dengan menu transaksi KDP senilai Rp208.964.000 dikarenakan pembayarannya dilakukan dalam dua tahap dibulan berbeda dalam tahun yang sama dan pada akhir tahun pembangunan sudah selesai sehingga masuk pada asset definitifnya;
2. Penambahan jaringan CCTV Gedung P Arsip Nasional RI dan pembuatan partisi kaca di Satker BATA senilai Rp248.265.750;
3. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas senilai Rp12.186.900 yang bersal dari bangunan gedung instalasi (genset) dan gedung Pos Jaga Darurat di Gedung Gajah Mada dan reklasifikasi irigasi saluran air di Satker BATA;
4. Pengembangan dengan KDP senilai Rp2.764.952.000 yang berasal dari pekerjaan perbaikan toilet gedung A dan C, perbaikan atap gedung E,G dan O;
5. Koreksi nilai beban pemeliharaan rumah dinas Deputi Konservasi ANRI yang harus dikapitalisasi senilai Rp36.300.000.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2015 disajikan pada CaLBMN.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp11.170.483.797

C.15 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar

Rp11.170.483.797 dan Rp11.182.670.697 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	11,182,670,697
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	12,186,900
Saldo per 31 Desember 2015	11,170,483,797
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(4,871,268,690)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	6,299,215,107

Pengurang irigasi senilai Rp12.186.900 berasal dari reklasifikasi irigasi saluran air di Satker BATA. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2015 disajikan pada CaL BMN sebagai Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp12.527.828.439

C.16 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp12.527.828.439 dan Rp11.458.093.385.

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2015

Saldo per 31 Desember 2014	11,458,093,385
Mutasi tambah:	
Pembelian	196,587,250
Penyelesaian pembangunan dengan KDP	719,999,951
Koreksi pencatatan	152,918,986
Koreksi nilai buku yang dijual ke masyarakat	228,867
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2015	12,527,828,439
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Nopember 2015	(57,555,213)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	12,470,273,226

Sampai dengan tanggal pelaporan ini telah terjadi mutasi debit pada aset tetap lainnya yang terdiri dari:

- 1) Pembelian sebesar Rp17.087.250 yang berasal dari bahan perpustakaan tercetak pada Pusjibang Sistem Kearsipan;
- 2) Pembelian sebesar Rp179.500.000 yang berasal dari pembuatan video documenter Presiden RI dan video pembuatan film layanan public terpadu;

M

- 3) Penyelesaian pembangunan dengan KDP berupa digitalisasi arsip kertas, foto dan video yang termasuk dalam kelompok barang bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro senilai Rp719.999.951;
- 4) Koreksi pencatatan nilai/kuantitas yang disebabkan penilaian terhadap bahan perpustakaan tercetak dan kartografi, naskah dan lukisan di Arsip Nasional Jl.Gajah Mada Jakarta Barat. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas berasal dari bahan perpustakaan tercetak senilai Rp12.414.973 dan kartografi, naskah dan lukisan senilai Rp140.504.013;
- 5) Koreksi atas nilai buku yang dijual ke masyarakat sebanyak 2 buah ke dalam aplikasi persediaan senilai Rp228.867.

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada CaLBMN sebagai Lampiran Laporan Keuangan.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp 34.320.000*

C.17 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp34.320.000 dan Rp0 yang berasal belanja modal pengadaan jasa konsultan pra perencana teknis gedung (bangunan) Gajah Mada ANRI oleh CV. Gubah Cipta Sasana dengan Nomor SPK PL.06/852.05/2015 tanggal 4 November 2015.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2015

Saldo per 31 Desember 2014	Jumlah
Mutasi tambah:	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	34,320,000
Koreksi pencatatan	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2015	34,320,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	-
Nilai Buku per 31 Desember 2015	34,320,000

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada CaLBMN sebagai Lampiran Laporan Keuangan.

u 
- 65 -

*Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap
Rp183.996.131.488*

C.18 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp183.996.131.488 dan sebesar Rp170.697.865.610.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
<i>UNAUDITED</i>				
1	Peralatan dan Mesin	180,494,503,913	144,515,282,564	35,979,221,349
2	Gedung dan Bangunan	197,186,379,198	37,385,415,907	159,800,963,291
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	11,170,483,797	4,871,268,690	6,299,215,107
4	Aset Tetap Lainnya	12,527,599,572	57,555,213	12,470,044,359
5	KDP	34,320,000	0	34,320,000
Total		401,413,286,480	186,829,522,374	214,583,764,106
<i>AUDITED</i>				
1	Peralatan dan Mesin	177,882,634,951	141,681,891,678	36,200,743,273
2	Gedung dan Bangunan	197,222,679,198	37,385,415,907	159,837,263,291
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	11,170,483,797	4,871,268,690	6,299,215,107
4	Aset Tetap Lainnya	12,527,828,439	57,555,213	12,470,273,226
5	KDP	34,320,000	0	34,320,000
Total		398,837,946,385	183,996,131,488	214,841,814,897

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin *unaudited* sebesar Rp144.515.282.564 menjadi sebesar Rp141.681.891.678, dikarenakan koreksi mutasi debit senilai Rp2.833.390.886 yang berasal dari reklasifikasi atas akumulasi aset rusak yang masih ada pada aset tetap sehingga ikut terkoreksi akumulasi penyusutannya.

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 disajikan pada CaLMBN sebagai Lampiran Laporan Keuangan.

*Aset Tak Berwujud
Rp9.078.456.505*

C.19 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp9.078.456.505 dan Rp8.170.142.625, dengan rincian sebagai berikut :

+

M

Rincian Aset Tak Berwujud

Saldo per 31 Desember 2014	8,170,142,625
Mutasi tambah:	
Pembelian	787,063,960
Pengembangan nilai aset	121,249,920
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2015	9,078,456,505
Amortisasi s.d. 31 Desember 2015	-
Nilai Buku per 31 Desember 2015	9,078,456,505

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi tambah diperoleh dari pembelian berupa aplikasi yang mendukung program penyelenggaraan kearsipan nasional dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan ANRI. Rincian Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Penyusutannya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 disajikan pada CaL BMN sebagai Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Lain-Lain

Rp6.565.657.412

C.20 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp6.565.657.412 dan Rp3.685.883.450. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintahan dan Aset Lain-Lain.

Rincian Aset Lain-lain TA 2015 Unaudited

No.	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3,329,543,691
2	Aset Lain-Lain	356,339,759
	Jumlah	3,685,883,450

Adapun mutasi aset lain-lain aset tetap yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2015 Audited

Saldo per 31 Desember 2014	3,685,883,450
Mutasi debit:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2,879,773,962
Mutasi kredit	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	0
- penghapusan BMN	0
Saldo per 31 Desember 2015	6,565,657,412
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(0)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	6,565,657,412

f

Saldo akhir nilai Aset Lain-lain audited sebesar Rp6.565.657.412, terjadi koreksi mutasi debit senilai Rp2.879.773.962 yang berasal dari reklasifikasi atas koreksi akumulasi penyusutan aset rusak yang masih ada pada aset tetap. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada CaLBMN yang merupakan Lampiran Laporan Keuangan.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp2.861.125.772*

C.21 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.861.125.772 dan Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	<i>Aset Tak Berwujud</i>	9,078,456,505	-	9,078,456,505
	Jumlah	9,078,456,505	-	9,078,456,505
B	Aset Lainnya	6,565,657,412	2,861,125,772	3,704,531,640
	Jumlah	6,565,657,412	2,861,125,772	3,704,531,640

saldo akhir Akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya audited sebesar Rp2.861.125.772 berasal aset rusak yang dihentikan penggunaannya senilai Rp2.879.773.962, dikurangi reklasifikasi penyusutan aset lainnya senilai Rp18.648.190.

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp3.273.364.518*

C.22 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 audited masing-masing sebesar Rp3.273.364.518 dan Rp2.210.106.093. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Arsip Nasional Republik Indonesia, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari tunjangan kinerja pegawai, uang makan pegawai yang belum dibayar, dan belanja barang yang tagihannya belum dilunasi.

JK

M

No.	Uraian	Jumlah
1	Tagihan langganan air PAM Pusdiklat bulan November dan Desember 2015	6.339.220
2	Belanja Pegawai tunjangan kinerja pegawai ANRI bulan Desember 2015	2.337.892.425
3	Belanja Pegawai uang makan pegawai ANRI bulan Desember 2015	269.848.000
4	Tagihan Listrik beban Desember 2015	594.550.325
5	Tagihan telekomunikasi beban Desember 2015	12.827.923
6	Pemeliharaan 1 unit elevator	2.475.000
7	Belanja Pegawai kekurangan Gaji Gol.III dan IV untuk 7 pegawai	542.168
8	Belanja Pegawai kekurangan Gaji Gol.III dan IV untuk 24 jiwa	4.990.000
9	Belanja Pegawai kekurangan Gaji Gol.III dan IV untuk 24 jiwa	2.250.000
10	Belanja pegawai kekurangan rapel kenaikan pangkat PNS 2015 yang diajukan di tahun 2016	14.541.222
11	Belanja Pegawai kekurangan rapel KGB PNS 2015 yang diajukan di tahun 2016	632.271
12	Tagihan Listrik beban Desember 2015 (BATA)	24.531.006
13	Tagihan Telekomunikasi beban Desember 2015 (BATA)	1.762.223
14	Tagihan langganan air bulan Desember 2015 (BATA)	182.735
TOTAL		3.273.364.518

Utang kepada Pihak Ketiga *audited* terdapat koreksi mutasi debet senilai Rp181.700.269 yang berasal dari :

- Salah saji biaya telekomunikasi beban bulan Desember 2015 sebesar Rp88.794 semula Rp12.916.717 menjadi Rp12.827.923.
- Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2015 sebesar Rp79.759.475 semula Rp2.417.651.900 menjadi Rp2.337.892.425 dan telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 15 Januari 2016, NTPN : FDFF06METF845H10;
- Kelebihan pembayaran uang makan bulan Desember 2015 sebesar Rp101.852.000 semula Rp371.700.000 menjadi Rp269.848.000 dan telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 15 Januari 2016, NTPN : D08246LUU3TADS10.

Sedangkan koreksi mutasi kredit senilai Rp15.173.493 berasal dari :

- Kurang catat belanja pegawai yang masih harus dibayar atas rapel kenaikan pangkat PNS tahun 2015 yang diajukan pada tahun 2016 sebesar Rp14.541.222 sesuai SPM No.00392/00153-

u 

01/2016 tanggal 8/4/2016, SP2D No.161391302007497 tanggal 11/4/2016;

- Kurang catat belanja pegawai yang masih dibayar atas rapel KGB PNS tahun 2015 yang diajukan pada tahun 2016 sebesar Rp632.271 sesuai SPM No.00394/001540-01/2016 tanggal 8/4/2016, SP2D No.161391302007496 tanggal 11/4/2016.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.23 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp78.304.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada Satker BAD provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp29.704.000 dan KAD provinsi Papua sebesar Rp48.600.000 pada tanggal pelaporan. Saldo Uang Muka dari KPPN periode 31 Desember 2015 audited sebesar Rp0, dimana pertanggungjawaban administrasi keuangan atas uang muka dari KPPN senilai Rp78.304.000 telah dilaksanakan oleh kedua satker tersebut dengan menyampaikan SPM GUP Nihil tanggal 18 Maret 2016 sesuai ketentuan Surat Nomor S-1883 tanggal 29 Februari 2016 tentang perpanjangan batas waktu pengesahan dan penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan untuk penyusunan LKKL dan LKBUN Audited TA 2015. Adapun Rincian SPM pertanggungjawaban administrasi keuangan atas uang muka dari KPPN sebagai berikut :

No.	Tgl.SPM/ SP2D	Nomor SPM/SP2D	Akun	Rupiah
BAD Kalimantan Timur				
1	31/12/2015	00013/150461701003778	521211	1.354.000
			521213	5.250.000
			522151	1.500.000
			524114	21.600.000
		Total		29.704.000
BAD Papua				
1	31/12/2015	00012/150631701003251	522151	6.600.000
			524114	42.000.000
		Total		48.600.000

Handwritten signature

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp1.065.000*

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0*

*Ekuitas
Rp444.733.429.518*

C.24 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp1.065.000 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan hutang pajak Bendahara yang belum disetorkan atas PPh pasal 21 honor tim pelaksana kegiatan Tahun 2015.

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp200.000 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per tanggal 31 Desember 2015 *audited* sebesar Rp0, terdapat koreksi mutasi debit senilai Rp200.000 yang berasal dari pembayaran piutang PNBPN Non Bendahara atas pegawai ANRI.

C.26 Ekuitas

Ekuitas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp444.733.429.518 dan Rp436.517.365.710. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo Ekuitas *audited* periode 31 Desember 2015 sebesar Rp444.733.429.518 dimana ada koreksi mutasi debit dan mutasi kredit.

Koreksi mutasi debit senilai Rp12.837.046 yang berasal dari :

- Koreksi hasil kapitalisasi timer AC pada satker BATA senilai Rp5.005.000 an;
- Koreksi persediaan obat dan alat kesehatan yang disajikan dengan harga terlalu tinggi dalam saldo persediaan per 31 Desember 2015 senilai Rp7.832.046.

Koreksi mutasi kredit senilai Rp1.351.841.526 yang berasal dari :

- Koreksi hasil penilaian atas BMN Rp1,00 yang belum masuk persediaan senilai Rp30.415.840;
- Koreksi atas persediaan nilai buku yang dijual ke masyarakat belum tercatat dalam aplikasi persediaan senilai Rp425.596.424;
- Koreksi pendapatan operasional atas penyeteroran denda

U

keterlambatan pekerjaan tahun 2014 yang disetorkan pada tahun 2015 senilai Rp42.224.690;

- Koreksi pendapatan non operasional atas penerimaan kembali belanja pegawai TAYL tahun 2014 senilai Rp161.469.756;
- Koreksi pendapatan operasional atas penerimaan kembali kelebihan belanja perjalanan dinas TAYL tahun 2014 senilai Rp67.700;
- Koreksi Transaksi antar entitas atas pertanggungjawaban UP/TUP Nihil Satker Dekonsentrasi Kalimantan Timur dan Papua senilai Rp78.304.000 dan;
- Selisih defisit Laporan Operasional senilai Rp613.763.116.

Uraian	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
Ekuitas Awal	436,517,365,710	-	-	436,517,365,710
Surplus/Defisit LO	(145,506,265,737)		613,763,116	(144,892,502,621)
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan				
Penyesuaian Nilai Aset	1,217,344,616	7,832,046	-	1,209,512,570
Penyesuaian Nilai Kewajiban	-	-	-	-
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan				
Koreksi Nilai Persediaan	-	-	456,012,264	456,012,264
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	203,177,237	2,273,633	-	200,903,604
Lain-Lain	-	-	203,762,146	203,762,146
Transaksi Antar Entitas	150,960,162,770	-	78,304,000	151,038,466,770
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	6,874,418,886	10,105,679	1,351,841,526	8,216,154,733
Ekuitas Akhir	443,391,784,596		1,341,735,847	444,733,520,443

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan

Pendapatan

Rp10.340.638.828

Jumlah Pendapatan pada Arsip Nasional RI untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp10.3340.638.828 dan Rp0. Adapun rincian dari jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan Operasional TA 2015 dan TA 2014

URAIAN	TH 2015	TH 2014	%NAIK (TRN)
Pendapatan PNBP Lainnya (Pendapatan Operasional)			
Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	407,726,800	0	0
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	1,609,036,000	0	0
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan Dan Teknologi sesuai dengan tugas dan Fungsi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga	513,775,800	0	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	80,683	0	0
Pendapatan Jasa Lainnya	7,797,363,500	0	0
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3,070,848	0	0
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	9,585,197		
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya (Pendapatan Operasional)	10,340,638,828	0	0
Jumlah	10,340,638,828	-	-

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah merupakan Pendapatan-LO (pendapatan operasional) yang diperoleh dari:

1. Pendapatan penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya (423116) senilai Rp407.726.800 yang berasal dari Peminjaman dan Penggandaan arsip pada unit Layanan Arsip;
2. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (423141) senilai Rp1.609.036.000 yang berasal dari pengguna sewa Gedung Gajah Mada dan sewa kamar pusat diklat kearsipan;
3. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, pelatihan dan teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (423216) senilai Rp513.775.800 yang berasal dari peserta diklat kearsipan;

M

4. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro (423221) senilai Rp80.683 yang berasal dari penyetoran Pendapatan Jasa giro pada Badan Arsip Daerah Kalimantan Timur, DKI Jakarta;
5. Pendapatan Jasa Lainnya (423291) senilai Rp7.797.363.500 berasal dari pembenahan, penyimpanan dan pembuatan sistem kearsipan yang berasal dari unit Pusat Jasa Kearsipan;
6. Pendapatan denda keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sesuai dengan SPK No.PL.03.04/409.05/2014 tanggal 12 September 2014, SPK No.PL.06/611.01/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dan adanya keterlambatan pengadaan bahan bakar khusus pada ANRI tahun 2014 semula Rp45.295.538, dengan adanya koreksi mutasi kredit senilai Rp42.224.690 maka pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah basis akrual menjadi Rp3.070.848;
7. Pendapatan Anggaran Lain-lain senilai Rp9.585.197 berasal dari setoran pengembalian belanja barang oleh Bendahara Pengeluaran BAPUSIPDA Jawa Barat menggunakan akun 423999 yang seharusnya adalah akun pengembalian belanja barang sebesar Rp9.520.000, Banten sebesar Rp500 dan reklas dari kelebihan setor atas pengembalian sisa UP dan TUP dari Bendahara Pengeluaran ANRI Satker PUSat (450448) sebesar Rp64.697.



u

Beban Pegawai
Rp64.997.923.073

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk Tahun 2015 dan Tahun 2014 adalah masing-masing sebesar Rp64.997.923.073 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai TA 2015 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	UNAUDITED	DEBET	KREDIT	AUDITED
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	37,102,775,204	15,173,493	101,852,000	37,016,096,697
Beban Lembur	250,347,000	0		250,347,000
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	27,848,026,204	0	116,546,828	27,731,479,376
Beban Pegawai Transito	0	0		0
Jumlah	65,201,148,408	15,173,493	218,398,828	64,997,923,073

Beban Pegawai tahun 2015 unaudited terdapat koreksi mutasi debet dan mutasi kredit sehingga hasil akhir beban pegawai (audited) tahun 2015 sebesar Rp64.997.923.073. Koreksi mutasi debet belanja pegawai senilai Rp15.173.493 berasal dari :

- Koreksi atas rapel kenaikan pangkat PNS tahun 2015 yang baru diajukan pada tahun 2015 senilai Rp14.541.222;
- Koreksi atas rapel KGB PNS tahun 2015 yang diajukan pada tahun 2016 senilai Rp632.271.

Sedangkan koreksi mutasi kredit belanja pegawai senilai Rp218.398.828 berasal dari :

- Koreksi tunjangan kinerja tahun 2015 yang belum dilakukan pemotongan terhadap pegawai cuti sakit senilai Rp24.847.415;
- Koreksi tunjangan kinerja tahun 2015 yang belum dilakukan pemotongan terhadap pegawai cuti bersalin senilai Rp6.499.833;
- Koreksi tunjangan kinerja tahun 2015 yang belum dilakukan pemotongan terhadap pegawai cuti besar senilai Rp3.780.355;
- Koreksi tunjangan kinerja tahun 2015 yang belum dilakukan pemotongan terhadap pegawai tugas belajar senilai Rp1.659.750;
- Koreksi kelebihan pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2015 yang dibayarkan tahun 2016 senilai Rp79.759.475 dan ;
- Koreksi kelebihan pembayaran uang makan bulan Desember 2015 yang dibayarkan tahun 2016 senilai Rp101.852.000.

f

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp14.160.999.389

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp14.160.999.389 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2015 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	KOREKSI		TH 2015
	UNAUDITED	DEBET	KREDIT	AUDITED
Beban Persediaan Konsumsi	13,773,172,273		0	13,773,172,273
Beban Persediaan Bahan Baku	251,582,550		0	251,582,550
Beban Persediaan Lainnya	134,847,366	1,397,200		136,244,566
Jumlah Beban Persediaan	14,159,602,189	1,397,200	0	14,160,999,389

Beban persediaan periode tanggal 31 Desember 2015 (*unaudited*) terdapat koreksi mutasi debit senilai Rp1.397.200 yang berasal dari koreksi atas lebih catat persediaan paket peraturan Kepala ANRI.

Beban Barang dan
Jasa
Rp35.715.773.889

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun 2014 adalah masing-masing sebesar Rp35.715.773.889 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2015 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	KOREKSI		TH 2015
	UNAUDITED	DEBET	KREDIT	AUDITED
Beban Barang Operasional	5,630,873,012		0	5,630,873,012
Beban Barang Non Operasional	14,358,309,214	14,704,000	200,290,000	14,172,723,214
Beban Langganan Daya dan Jasa	7,928,075,442		88,794	7,927,986,648
Beban Jasa Pos dan Giro	137,322,147		0	137,322,147
Beban Jasa Konsultan	183,099,600		0	183,099,600
Beban Sewa	1,670,815,018		0	1,670,815,018
Beban Jasa Profesi	4,408,457,750		0	4,408,457,750
Beban Jasa Lainnya	1,716,938,200		0	1,716,938,200
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3,263,600		0	3,263,600
Jumlah Belanja Barang dan Jasa (Kotor)	36,037,153,983	14,704,000	200,378,794	35,851,479,189
Pengembalian Belanja Barang dan Jasa	(135,705,300)		0	(135,705,300)
Jumlah	35,901,448,683	14,704,000	200,378,794	35,715,773,889

Beban barang dan jasa tahun 2015 *unaudited* terdapat koreksi mutasi

M

debet sebesar Rp 14.704.000 dan mutasi kredit sebesar Rp200.378.794. Koreksi mutasi debet berasal dari belanja barang non operasional satker dekonsentrasi BAD Kalimantan Timur senilai Rp14.704.000. Sedangkan koreksi mutasi kredit berasal dari :

- Koreksi atas kelebihan pembayaran honor operasional satker pengelola anggaran (521115) tahun 2015 senilai Rp47.900.000;
- Koreksi atas Pemborosan pembayaran honor tim pelaksana kegiatan (521213) tahun 2015 yang tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp85.452.500;
- Koreksi atas kelebihan pembayaran honor tim pelaksana kegiatan (521213) tahun 2015 senilai Rp62.135.000;
- Koreksi atas pengembalian pembayaran honor tim pelaksana kegiatan (521213) tahun 2015 yang dibayarkan pada tahun 2016 senilai Rp2.422.500;
- Koreksi atas kelebihan pembayaran honor narasumber kegiatan (522151) tahun 2015 yang dibayarkan pada tahun 2016 senilai Rp2.380.000 dan;
- Koreksi atas kesalahan kelebihan pencatatan beban telekomunikasi (522112) satker ANRI Pusat bulan Desember 2015 sebesar Rp88.794.



Beban Pemeliharaan D.5 Beban Pemeliharaan

Rp6.161.416.029

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp6.161.416.029 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2015 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	KOREKSI		TH 2015
	UNAUDITED	DEBET	KREDIT	AUDITED
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,743,123,235		148,002,540	2,595,120,695
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,174,646,050		324,077,816	2,850,568,234
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-		-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	172,030,750	-	-	172,030,750
Beban Persediaan Pemeliharaan	543,511,950	184,400	-	543,696,350
Jumlah	6,633,311,985	184,400	472,080,356	6,161,416,029

Beban pemeliharaan tahun 2015 *unaudited* terjadi koreksi mutasi debit yang berasal dari inventarisasi fisik persediaan untuk pemeliharaan barang pecah belah per 31 Desember 2015 senilai Rp184.400.

Sedangkan mutasi kredit berasal dari :

- Beban pemeliharaan gedung dan bangunan senilai Rp148.002.540 yang merupakan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (523111) terkait pekerjaan pemasangan kanopi garasi, perbaikan pintu pagar dan pemasangan teralis rumah dinas Deputi Konservasi yang dikapitalisasi sehingga menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp36.300.000; pekerjaan *digital catalogue hall A* ruang Diorama senilai Rp103.950.000 dan koreksi atas kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan di kantor ANRI pusat senilai Rp7.752.540 sesuai dengan SP2D No. 151391303019287 tgl. 30/10/2015 terkait pekerjaan pemasangan kanopi garasi & perbaikan pintu pagar serta pemasangan teralis rumah dinas Deputi Konservasi, 151391301014509 tgl. 23/07/2015 terkait pekerjaan pemasangan partisi lantai basement & lt. 5 gedung C serta pengecatan loby gedung A, 151391303019268 tgl. 30/10/2015 terkait pekerjaan perbaikan dan renovasi rumah dinas Deputi Konservasi;
- Beban pemeliharaan peralatan dan mesin yang dikapitalisasi sehingga menambah aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp324.077.466 yang merupakan belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129) terkait pekerjaan pemasangan partisi Lt. 8 Gd.C senilai Rp168.960.000 dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin kendaraan dinas/operasional ANRI berupa BBM RFID berkurang senilai Rp155.117.816 dan menjadi barang persediaan per 31 Desember 2015;

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp15.361.403.477*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp15.361.403.477 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2015 dan TA 2014*

Uraian	2015	2014
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
Beban Perjalanan Biasa	7,299,122,153	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	729,290,000	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,365,598,500	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,824,923,000	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bruto	15,218,933,653	-
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	591,338,780	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Netto	14,627,594,873	-
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri		
Beban Perjalanan Biasa-Luar Negeri	611,950,220	-
Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	161,718,284	-
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Bruto	773,668,504	-
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	39,859,900	-
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Netto	733,808,604	-
Beban Perjalanan Dinas	15,361,403,477	-

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2015 Unaudited dan Audited*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	KOREKSI		TH 2015
	UNAUDITED	DEBET	KREDIT	AUDITED
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
Beban Perjalanan Biasa	7,325,882,285		26,760,132	7,299,122,153
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	729,290,000			729,290,000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,301,998,500	63,600,000		5,365,598,500
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,824,923,000			1,824,923,000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bruto	15,182,093,785			15,218,933,653
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	591,338,780			591,338,780
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Netto	14,590,755,005			14,627,594,873
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri				
Beban Perjalanan Biasa-Luar Negeri	628,594,160		16,643,940	611,950,220
Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	171,083,699		9,365,415	161,718,284
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Bruto	799,677,859			773,668,504
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	39,859,900			39,859,900
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Netto	759,817,959			733,808,604
Beban Perjalanan Dinas	15,350,572,964	63,600,000	52,769,487	15,361,403,477

Beban Perjalanan Dinas tahun 2015 *Unaudited* terdapat koreksi mutasi debit sebesar Rp 63.600.000 dan mutasi kredit sebesar Rp52.769.487.

Koreksi mutasi debit yang mengakibatkan bertambahnya beban perjalanan dinas berasal dari belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota satker dekonsentrasi Badan Arsip Daerah Kalimantan Timur senilai Rp21.600.000 dan Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua senilai Rp42.000.000. Sedangkan koreksi mutasi kredit yang mengakibatkan berkurangnya beban perjalanan dinas berasal dari Koreksi atas kelebihan pembayaran belanja Perjalanan Dinas tahun 2015 yang dibayarkan Tahun 2016 senilai Rp26.760.132 dan Koreksi atas kelebihan pembayaran belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri tahun 2015 senilai Rp26.009.355.

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp19.053.069.390*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp19.053.069.390 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2015 dan TA 2014

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11,880,114,169	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6,277,669,550	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	867,218,666	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	15,120,775	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan Operasional Kegiatan	12,946,230		
Jumlah Penyusutan	19,053,069,390	0	0
Beban Amortisasi Aplikasi	0	0	0
Beban Amortisasi Software	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	19,053,069,390	0	0

Handwritten signature and the page number - 80 -

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2015 Unaudited dan Audited*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	KOREKSI		TH 2015
	UNAUDITED	DEBET	KREDIT	AUDITED
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11,864,401,274	15,712,895	-	11,880,114,169
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6,276,091,289	1,578,261	-	6,277,669,550
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	867,218,666	-	-	867,218,666
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	15,120,775	-	-	15,120,775
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan	-	12,946,230	-	12,946,230
Beban Amortisasi Aplikasi	-	-	-	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	19,022,832,004	30,237,386	0	19,053,069,390

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2015 *Unaudited* terdapat koreksi mutasi debit sebesar Rp 30.237.386 dan mutasi kredit sebesar Rp0.

Koreksi mutasi debit berasal dari :

- Koreksi atas beban penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp15.712.895 atas kapitalisasi belanja pemeliharaan;
- Koreksi atas beban penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp1.578.261 atas kapitalisasi belanja pemeliharaan;
- Koreksi atas Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin yang tidak digunakan untuk operasional kegiatan senilai Rp12.946.230.

Beban Penyisihan

Piutang Tak Tertagih

Rp1.033.262

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.033.262 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan piutang tak tertagih
TA 2015 dan TA 2014*

Uraian	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tagihan TGR	720,662	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jangka Panjang - TGR	312,600	0	0
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,033,262	-	-

Piutang Tagihan TGR dilakukan penyisihan berdasarkan kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan. Kualitas piutang untuk Piutang Tagihan TGR untuk tahun 2015 termasuk kedalam kategori lancar dengan penyisihan sebesar 0.5% dari jumlah piutang tagihan TGR.

**Perbandingan Rincian Beban Penyisihan piutang tak tertagih
TA 2015 Unaudited dan Audited**

URAIAN	TH 2015	KOREKSI		TH 2015
	UNAUDITED	DEBET	KREDIT	AUDITED
Beban Penyisihan Piutang Tagihan TGR	-	720,662	-	720,662
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jangka Panjang - TGR	27,538	285,062	-	312,600
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	27,538	1,005,724	0	1,033,262

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2015 *Unaudited* terdapat koreksi mutasi debit sebesar Rp1.005.724 dan mutasi kredit sebesar Rp0.

Koreksi mutasi debit berasal dari :

- Koreksi atas beban penyisihan piutang tidak tertagih bagian lancar senilai Rp720.662 ;
- Koreksi atas beban penyisihan piutang tak tertagih-TGR senilai Rp285.062.

*Kegiatan Non
Operasional
Rp218.477.060*

D.11. Kegiatan Non Operasional

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah Rp218.477.060 dan Rp0. Adapun rincian perbandingan kegiatan non operasional adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2015 dan TA 2014

URAIAN	TH 2015	TH 2014
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	14.700.000	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	30.776.820	0
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(16.076.820)	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	234.618.500	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	64.620	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	234.553.880	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	218.477.060	0

Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari :

- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp14.700.000 berasal dari pendapatan dari pemindahan BMN Lainnya yang

[Handwritten Signature]



M

merupakan hasil bersih lelang barang Milik Negara ANRI sesuai dengan RL No.372/2015 tanggal 23 Desember 2015 oleh Pejabat Pelang : Januar Edy Purwoko,SE;

- Beban Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp30.776.820 berasal dari:
 - ~ Penghentian Aset dari penggunaan berasal dari penghapusan BMN yang tidak dapat digunakan lagi dikarenakan rusak berat dan dihapus dengan cara dijual/dilelang pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Arsip Nasional RI No. 348.A Tahun 2015 tentang Penghapusan BMN di Lingkungan ANRI sebesar Rp2.936.570.588;
 - ~ Akumulasi Penyusutan Aset atas Penghentian Aset dari penggunaan berasal dari penghapusan BMN yang tidak dapat digunakan lagi dikarenakan rusak berat dan dihapus dengan cara dijual/dilelang pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Arsip Nasional RI No. 348.A Tahun 2015 tentang Penghapusan BMN di Lingkungan ANRI sebesar Rp2.905.793.768.
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp234.618.500 pendapatan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara pada tahun 2015;
- Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp64.620 berasal dari pesediaan rusak/usang yang berasal dari obat-obatan di poliklinik ANRI Jakarta.

*Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2015 Unaudited dan Audited*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	KOREKSI		TH 2015
	UNAUDITED	DEBET	KREDIT	AUDITED
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	14,700,000	-	-	14,700,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	30,776,820	-	-	30,776,820
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(16,076,820)	-	-	(16,076,820)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	395,955,956	161,537,456	200,000	234,618,500
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	64,620	-	-	64,620
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	395,891,336	161,537,456	200,000	234,553,880
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	379,814,516	161,537,456	200,000	218,477,060

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2015 Unaudited terdapat koreksi mutasi debit sebesar Rp 161.537.456 dan mutasi kredit sebesar Rp200.000. Koreksi mutasi kredit berasal dari reklas atas pembayaran angsuran TGR ijin belajar bulan Januari 2016 yang dibayarkan pada bulan Desember 2015 sedangkan untuk koreksi mutasi debit berasal dari :

- Koreksi atas penerimaan kembali belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu tahun 2014 senilai Rp161.469.756 yang mempengaruhi berkurangnya pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya ;
- Koreksi atas penerimaan kembali belanja barang atas perjalanan dinas Tahun Anggaran Yang Lalu tahun 2014 senilai Rp67.700 yang mempengaruhi berkurangnya pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya ;

Pos Luar Biasa

D.12. Pos Luar Biasa

Rp0

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Rp436.517.365.710

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp436.517.365.710 dan Rp0. Dalam Implementasi akuntansi berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, nilai ekuitas per 1 Januari 2015 tersebut adalah merupakan reklasifikasi dari akun-akun neraca sebagai berikut :

Jenis Akun	Nilai
Kewajiban Yang Ditangguhkan	0
Ekuitas Dana Lancar	(117,598,637)
Ekuitas Dana Diinvestasikan	436,634,964,347
Nilai Ekuitas Per 1 Januari 2015	436,517,365,710

Defisit LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

(Rp144.892.502.621),-

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah defisit sebesar Rp144.892.502.621 dan Rp0 merupakan selisih kurang antara Pendapatan Operasional dengan Beban Operasional dan Pendapatan Non Operasional dengan Beban Non Operasional.

[Handwritten signature]

u

Jumlah Defisit LO Tahun 2015 Unaudited terdapat koreksi karena adanya koreksi pada Pendapatan Operasional, Beban Operasional, Pendapatan Non Operasional dan Beban Non Operasional pada Laporan Operasional senilai Rp613.763.116 dari defisit LO *Unaudited* Tahun 2015 sejumlah Rp145.506.265.737.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp1.209.512.570,-

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset digunakan untuk menyesuaikan nilai persediaan pada Tahun Berjalan. Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp1.209.512.570 dan Rp 0 dengan rincian sbb :

SATKER	Penyesuaian Nilai Aset
ANRI Jakarta	1,209,041,970
Balai Arsip Tsunami Aceh	470,600
Jumlah Penyesuaian Nilai Aset	1,209,512,570

Penyesuaian Nilai Aset disebabkan karena adanya :

- Penyesuaian nilai persediaan yang disebabkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menggunakan Metode Penilaian Persediaan Harga Perolehan Terakhir yaitu sebesar Rp941.525.066 yang berasal dari Satker ANRI Jakarta sebesar Rp941.054.466 dan Balai Arsip Tsunami Aceh sebesar Rp470.600;
- Koreksi atas kesalahan pencatatan Persediaan yang terjadi pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 267.987.504 berasal dari Satker ANRI Jakarta, disebabkan adanya kesalahan pencatatan jumlah satuan barang dan harga satuan terhadap barang konsumsi berupa alat tulis, penjepit kertas dan alat perekat.

*Perbandingan Rincian Penyesuaian Nilai Aset
TA 2015 Unaudited dan Audited*

Uraian	TH 2015	KOREKSI		TH 2015
	UNAUDITED	DEBET	KREDIT	AUDITED
ANRI Jakarta				
Penyesuaian Nilai Persediaan	1,216,874,016	8,175,229	343,183	1,209,041,970
Balai Arsip Tsunami Aceh				
Penyesuaian Nilai Persediaan	470,600	-	-	470,600
Total Penyesuaian Nilai Persediaan	1,217,344,616	8,175,229	343,183	1,209,512,570

Penyesuaian Nilai Persediaan tahun 2015 *Unaudited* terdapat koreksi mutasi kredit sebesar Rp 343.183 dan mutasi debit sebesar Rp8.175.229. Jumlah pengurangan mutasi debit dikurangi mutasi

kredit senilai Rp7.832.046 merupakan koreksi atas persediaan obat dan alat kesehatan yang disajikan dengan harga yang terlalu tinggi dalam saldo persediaan per 31 Des 2015 *Unaudited*.

*Penyesuaian Nilai
Kewajiban Rp0*

E.4 Penyesuaian Nilai Kewajiban

Penyesuaian Nilai Kewajiban merupakan Koreksi atas kesalahan Kewajiban (Utang Jangka pendek maupun Jangka Panjang) yang terjadi pada Tahun Anggaran Berjalan dan diperbaiki pada TA Berjalan juga. Penyesuaian Nilai Kewajiban untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp456.012.264*

E.5 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam nilai persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp456.012.264 dan Rp0.

Koreksi Nilai Persediaan tahun 2015 *Unaudited* terdapat koreksi mutasi kredit sebesar Rp456.012.264 yang berasal dari :

- Koreksi hasil penilaian atas BMN Rp1 untuk peralatan rumah tangga Gedung Arsip Gajah Mada yang belum masuk dalam persediaan senilai Rp30.415.840;
- Koreksi atas nilai buku cetakan Subdirektorat Layanan dan Pemanfaatan yang digunakan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat namun belum dicatat dalam aplikasi persediaan pada Laporan Keuangan *Unaudited* senilai Rp 425.596.424.

*Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

E.6 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap merupakan penyesuaian/koreksi nilai aset tetap karena adanya Inventarisasi dan Penilaian dari Tim Penertiban Aset Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Atas Beban
Rp200.903.604*


E.7 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi merupakan mengkoreksi nilai aset tetap selain karena adanya Inventarisasi dan Penilaian dari DJKN Kementerian Keuangan. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode

yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp200.903.604 dan Rp0 dengan rincian sbb:

<i>Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi</i>		
No	Keterangan	Jumlah
1	Pertanggal 31 Juli 2015 terdapat faktur barang dengan tanggal perolehan di Semester I sedangkan pembayaran dilakukan di Semester II (lintas periode) sehingga menimbulkan akumulasi penyusutan transaksional	(51,549,625)
2	Nilai hasil tindak lanjut BPK terhadap BMN yang berasal dari Yayasan Gedung Arsip Nasional pada satker ANRI Jakarta	152,918,986
3	Pertanggal 31 Oktober 2015 terdapat akumulasi penyusutan transaksional hasil reklasifikasi dari intrakomptebel akibat penilaian BMN Rp1	(40,990,241)
4	Penghapusan semu karena reklasifikasi dari Intrakomptebel ke Extrakomptebel yang berasal dari peralatan dan mesin yang disebabkan oleh penilaian terhadap BMN bernilai Rp1	136,741,979
5	Kapitalisasi aset yang bersumber dari realisasi kegiatan pemeliharaan	1,430,000
6	Nilai buku cetakan Subdirektorat Layanan dan Pemanfaatan yang digunakan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dicatat ke aset tetap lainnya	228,867
7	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang dikoreksi karena dikapitalisasi namun tidak masuk syarat kapitalisasi dimana tidak menambah kapasitas dan umur ekonomis sehingga perlu dikeluarkan dari laporan barang	2,502,500
8	Per tanggal 31 Desember 2015 terdapat akumulasi penyusutan akibat reklasifikasi dari irigasi ke gedung dan bangunan	(609,345)
9	Pada Satker Balai Tsunami Aceh terdapat Reklasifikasi Keluar BMN berupa Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)/3.06.01.02.086.1	(8,074,000)
10	Pada Satker Balai Tsunami Aceh terdapat Reklasifikasi keluar BMN berupa Saluran Air Kotor Sambungan dari Rumah/5.02.07.05.006.1	(12,186,900)
11	Pada Satker Balai Tsunami Aceh terdapat Reklasifikasi Masuk BMN berupa Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/3.05.02.06.055.1	8,074,000
12	Pada Satker Balai Tsunami Aceh terdapat koreksi pencatatan nilai/kuantitas berasal koreksi Tim BPK atas pekerjaan perbaikan AC Sentral sebesar Rp5.005.000 yang menggunakan belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi namun tidak masuk syarat kapitalisasi dimana tidak menambah kapasitas dan umur ekonomis sehingga perlu dikeluarkan dari laporan barang	(5,005,000)
13	Pada Satker Balai Tsunami Aceh terdapat koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Bangunan Perubahan Gedung Kantor Permanen /4.01.01.01.001.1	12,186,900
14	Per tanggal 31 Desember 2015 terdapat akumulasi penyusutan akibat reklasifikasi masuk dari alat pemanas air (penyusutan transaksional) menjadi Heater (alat rumah tangga lainnya)	807,400
15	Per tanggal 31 Desember 2015 terdapat akumulasi penyusutan akibat reklasifikasi dari irigasi ke gedung dan bangunan	853,083
16	Kapitalisasi aset yang bersumber dari realisasi kegiatan pemeliharaan	3,575,000
Total		200,903,604

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi tahun 2015 *Unaudited* terdapat koreksi mutasi debit sebesar Rp5.005.000 dan mutasi kredit sebesar Rp2.731.367. Mutasi debit sebesar Rp5.005.000 berasal dari koreksi atas hasil kapitalisasi timer AC pada satker Balai Arsip Tsunami Aceh

M  - 87 -

sedangkan untuk koreksi mutasi kredit berasal dari :

- Koreksi atas Nilai buku cetakan Subdirektorat Layanan dan Pemanfaatan yang digunakan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dicatat ke aset tetap lainnya senilai Rp228.867 ;
- Koreksi atas Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang dikoreksi karena dikapitalisasi namun tidak masuk syarat kapitalisasi dimana tidak menambah kapasitas dan umur ekonomis sehingga perlu dikeluarkan dari laporan barang senilai Rp2.502.500.

Lain-Lain

Rp203.762.146

E.8 Lain-lain

Lain-lain merupakan koreksi kesalahan pencatatan atas transaksi selain Aset (selain mengkoreksi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya). Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp203.762.146 dan Rp0 dengan rincian sbb:

Koreksi Lainnya		
No	Keterangan	Jumlah
1	Koreksi atas pengembalian Tunjangan Kinerja Pegawai ANRI bulan Desember 2014)	67,940,920
2	Koreksi atas setoran pengembalian uang makan pegawai ANRI bulan Desember 2014	63,640,000
3	Koreksi atas pengembalian Tukin para pegawai yang cuti besar dan cuti bersalin Tahun 2014	29,888,836
4	Koreksi atas pengembalian belanja barang atas perjalanan dinas	67,700
5	Koreksi atas pendapatan keterlambatan penyelesaian pekerjaan TA 2014	42,224,690
Total		203,762,146

Koreksi Lain-lain tahun 2015 *Unaudited* tidak ada, jadi koreksi lain-lain pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2015 Audited merupakan koreksi dari Tim BPK.


Transaksi Antar

Entitas

Rp151.038.466.770

E.9 Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp151.038.466.770. Jumlah tersebut terdiri dari sbb:


 U - 88 -

URAIAN	Nilai
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	161,454,661,944
Diterima Dari Entitas Lain	(10,577,067,174)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	160,872,000
Transaksi Antar Entitas	151,038,466,770

Ditagihkan Kepada Entitas Lain merupakan Realisasi Belanja setelah dikurangi dengan pengembalian belanja dengan rincian sbb:

Ditagihkan Kepada Entitas Lain			
Uraian	2015		
	Realisasi Belanja	Pengembalian Belanja	Belanja Netto
Belanja Pegawai	66,089,098,501	875,212,877	65,213,885,624.00
Belanja Barang	71,880,985,003	766,903,980	71,114,081,023.00
Belanja Modal	25,126,695,297	0	25,126,695,297.00
Total	163,096,778,801	1,642,116,857	161,454,661,944

Diterima dari Entitas Lain merupakan Realisasi Pendapatan setelah dikurangi pengembalian Pendapatan dengan rincian sbb :

Diterima Dari Entitas Lain		
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan	407,726,800
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	14,700,000
423141	Pendapatan Sewa, Gedung, dan Bangunan	1,609,036,000
423216	Pendapatan Jasa Tenaga Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	513,775,800
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	80,683
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	7,797,363,500
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	45,295,538
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	17,966,200
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	161,469,756
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	67,700
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	9,585,197
Realisasi Pendapatan Netto		10,577,067,174

Transfer Masuk berasal dari Satker Balai Arsip Tsunami Aceh atas Tanah senilai Rp160,872,000 pada Tahun 2015 yang diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan Berita Acara Serah terima Barang Milik Negara berupa sebagian tanah di Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat C.q. Balai

✓

Wilayah Sungai Sumatera I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Arsip Nasional Republik Indonesia C.q. Balai Arsip Tsunami Aceh Nomor: 03/BA/BWS.SI/2015 dan sesuai Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Hak Pakai No. 0004 Tahun 2015 di Desa Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar seluas 4,000 m2.

*Kenaikan/Penurunan
Ekuitas
Rp8.216.154.733*

E.10 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit LO ditambah dengan Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan ditambah dengan Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp8.216.154.733 dan Rp0 dengan rincian sbb:

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	
Defisit LO	(144,892,502,621)
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan	1,209,512,570
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	860,678,014
Transaksi Antar Entitas	151,038,466,770
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	8,216,154,733

Ekuitas Akhir

Rp444.733.521.443

E.11 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp444.733.521.443 dan Rp0.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

*Kejadian-Kejadian
Penting Setelah
Tanggal Neraca*

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Setelah tanggal 31 Desember 2015 terdapat beberapa jurnal penyesuaian berdasarkan usulan koreksi dari Tim BPK yang mempengaruhi saldo *audited* pada pos-pos Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

- Koreksi atas kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember Tahun Anggaran 2015 yang dibayarkan tahun 2016 sebesar Rp79.759.475,-;
- Koreksi atas kelebihan pembayaran Uang Makan bulan Desember Tahun Anggaran 2015 yang dibayarkan pada

K

tahun 2016 sebesar Rp101.852.000,-;

- Koreksi atas kelebihan pembayaran Honor Kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang dibayarkan pada tahun 2016 sebesar Rp152.390.000,-;
- Koreksi atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Biasa Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015 yang dibayarkan pada tahun 2016 sebesar Rp26.706.132,-;
- Koreksi atas pembayaran rapel kenaikan pangkat PNS Tahun Anggaran 2015 yang dibayarkan pada tahun 2016 sebesar Rp14.541.222,-;
- Koreksi atas pembayaran rapel kenaikan Gaji Berkala PNS Tahun Anggaran 2015 yang dibayarkan pada tahun 2016 sebesar Rp632.271,-;
- Koreksi atas Pengesahan Pertanggungjawaban UP/GUP Tahun Anggaran 2015 pada Satker BAD Kalimantan Timur sebesar Rp29.704.000,-; dan Satker BAD Papua sebesar Rp48.600.000,-
- Koreksi atas nilai buku yang dijual ke masyarakat namun belum dicatat di aplikasi persediaan sebesar Rp425.825.291,-
- Koreksi atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun Anggaran 2015 yang dibayarkan pada tahun 2016 sebesar Rp26.009.355;
- Koreksi atas kelebihan pembayaran Honor Operasional Satker Tahun Anggaran 2015 yang dibayarkan pada tahun 2016 sebesar Rp47.900.000;
- Koreksi atas kekurangan pemotongan PPh Ps.21 atas Honor Tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang dibayarkan tahun 2016 Rp1.065.000;
- Koreksi atas kelebihan pembayaran Tukin dan Uang Makan dikarenakan pegawai yang melaksanakan cuti bersalin, cuti sakit, cuti besar dan tugas belajar sebesar Rp36.787.353;
- Koreksi atas kurang volume belanja pemeliharaan Tahun Anggaran 2015 yang dibayarkan di tahun 2016 sebesar Rp7.752.940;
- Koreksi atas denda keterlambatan pekerjaan Tahun Anggaran



u

2014 yang dibayarkan pada tahun 2015 sebesar Rp42.224.690;

- Koreksi atas kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja dan Uang Makan bulan Desember Tahun Anggaran 2014 yang dibayarkan tahun 2015 sebesar Rp161.469.756;
- Koreksi atas kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Biasa Dalam Negeri Tahun Anggaran 2014 yang dibayarkan pada tahun 2015 sebesar Rp67.700.

F.2 PENGUNGKAPAN LAINNYA

Pengungkapan Lainnya

F.2.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 berdasarkan DIPA Induk Nomor SP DIPA-087.01-0/2015 tanggal 14 November 2014 dengan total anggaran sebesar Rp 172.052.947.000 yang pengelolaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh satuan kerja yang terdiri atas :

- 1) Satker Kantor Pusat ANRI Jakarta (450448) dengan pagu anggaran senilai Rp 163.675.647.000 yang terbagi dalam RM (Rupiah Murni) senilai Rp 157.190.584.000 dan PNPB (PNP) TA Berjalan senilai Rp 6.485.063.000;
- 2) Satker Kantor Daerah (Balai Arsip Tsunami Aceh/681464) dengan pagu anggaran senilai Rp 2.100.000.000;
- 3) Satker Dekonsentrasi (DK) yang keseluruhannya berjumlah 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja (satker) dekonsentrasi dengan total pagu anggaran senilai Rp 6.277.300.000.

Satker Kantor Pusat ANRI Jakarta (450448) selama tahun berjalan, mengalami perubahan anggaran dengan melakukan revisi DIPA sebanyak empat kali revisi DIPA yakni :

- a) DIPA Nomor : SP DIPA-087.01.1.450448/2015 tanggal 14 November 2014;
- b) Revisi ke 01 DIPA tanggal 16 Maret 2015 No : SP DIPA-087.01.1.450448/2015;
- c) Revisi ke 02 DIPA tanggal 11 Mei 2015 No : SP DIPA-087.01.1.450448/2015;
- d) Revisi ke 03 DIPA tanggal 25 September 2015 dengan Nomor

: SP DIPA-087.01.1.450448/2015;

- e) Revisi ke 04 DIPA tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor :
SP DIPA-087.01.1.450448/2015.

Perubahan anggaran juga dialami oleh satker Balai Arsip Tsunami Aceh sebanyak satu kali revisi DIPA yakni :

- a) DIPA Nomor:SP DIPA-087.01.2.681464/2015 tanggal 14 November 2014;
b) Revisi ke 01 DIPA tanggal 7 April 2015 dengan Nomor: SP DIPA-087.01.2.681464.

F.2.2 Pengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Untuk melaksanakan dan mengelola APBN ANRI TA 2015 satker Kantor Pusat membentuk tim pelaksana/pengelola APBN pada ANRI TA 2015 sesuai dengan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 yang terdiri dari :

Jabatan Dalam Tim	Nama
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Dra. Gina Masudah Husni, M.Hum
2. Pejabat Penguji Penandatanganan SFM (PPSPM)	Syaifuddin, SE. MM
3. PPK Deputy Bidang Pembinaan Kearsipan	Kahim Sundjaja, SE. MM
4. PPK Deputy Bidang Konservasi Arsip	Yanah Suryanah, Dipl.Kim
5. PPK Pusdiklat Kearsipan	Dra. Sulistyowati, MM
6. PPK Deputy Bidang IPSK	Eksanto, S.Si
7. PPK Sekretariat Utama	Dipo Winarto, SE.MM
8. PPK Pusat Jasa Kearsipan	Kismadi, S.Sos
9. PPK Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	Dewi Santi Andriani, SE. M.Si
10. Atasan Langsung Bendahara Penerimaan	Ali Sugeng, SE. M.Si
11. Bendahara Pengeluaran	Wijiyanto, S.Sos
12. Bendahara Penerimaan	Wasito, S.Sos

Seiring perjalanan waktu susunan tim pelaksana/pengelola APBN pada Arsip Nasional Republik Indonesia tahun anggaran 2015 mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada :

- Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2015 tanggal 9 Februari 2015 yang menetapkan perubahan nama Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Utama yang semula dijabat oleh Dipo Winarto, S.E., M.M. digantikan oleh Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B.
- Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 218

M

Tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015 yang menetapkan Drs. M.Taufik, M.Si sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menggantikan Dra. Gina Masudah Husni, M.Hum yang memasuki pensiun mulai tanggal 1 Agustus 2015.

- 3) Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: 221 Tahun 2015 tanggal 6 Agustus 2015 yang menetapkan Abdul Haris M.Ali, S.H., M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Deputy Pembinaan Kearsipan menggantikan Kahim Sundjaja, S.E., M.M. yang sedang menjalani cuti besar.

Pembentukan tim pelaksana/pengelola APBN juga dilakukan oleh satker Balai Arsip Tsunami Aceh yang terdiri atas :

Jabatan Dalam Tim	Nama
Surat Keputusan Kepala ANRI Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015;	
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Dra. Gina Masudah Husni, M.Hum
Surat Keputusan Kepala ANRI Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015	
1. Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (PPSPM)	Sarip Hidayat, S.Kom
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Lisa Noviyanti, SE
3. Bendahara Pengeluaran	Nanik Kurniawati, S.Sos
4. Staf Pengelola Keuangan	Sri Wahyuni, SE

F.2.3 Pergantian Pejabat Tinggi Madya

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/M Tahun 2015 tanggal 18 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pemimpin Tinggi Madya di Lingkungan Arsip Nasional RI yang semula dijabat Dra. Gina Masudah Husni, M.Hum. digantikan oleh Drs. Sumrahyadi, MIMS sebagai Sekretariat Utama Arsip Nasional RI.

F.2.4 Khasanah Arsip Statis Arsip Nasional RI

Jumlah awal khasanah arsip statis berdasarkan hasil inventarisasi ulang pada tahun 2015 yang merupakan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK TA. 2014 telah dikeluarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 348 Tahun 2015 tentang Jumlah Khasanah Arsip Statis ANRI Tahun 2014. Berdasarkan Berita Acara Wawancara dan Pengamatan Fisik atas Khasanah Arsip Statis No. 02/BA/Khasanah/03/2016 pada hari

Rabu, 30 Maret 2016, terdapat kenaikan pada tahun 2015 berdasarkan hasil penyelamatan arsip statis selama tahun 2015 yaitu Arsip kertas 426,60 ML, Arsip Kartografi 189,00 Lembar, Arsip Foto 2.285.466,00 lembar, Arsip berupa optical disc 37,00 keping, dan Video 1 kaset dengan rincian sbb:

Data Khasanah Arsip Statis Arsip Nasional RI Tahun 2015

No.	Arsip	Satuan	Hasil Inventarisasi (Tahun 2014)	Jumlah Tahun 2015	Kenaikan
1.	Kertas	M Linier	29.217,00	29.643,60	426,60
2.	Poster	Lembar	332,00	332,00	0
3.	Kartografi/Peta	Lembar	128.403,00	128.592,00	189,00
4.	Foto	Lembar	1.157.888,00	3.443.354,00	2.285.466,
5.	Film	Reel	58.997,00	58.997,00	0
6.	Mikrofilm	Roll	14.463,00	14.463,00	0
7.	Mikrofishce	Fische	14.262,00	14.262,00	0
8.	Rekaman Suara	Kaset	44.903,00	44.903,00	0
9.	Reel to Reel Sound	Reel	873,00	873,00	0
10.	Video	Kaset	25.200,00	25.201,00	1,00
11.	Optical Disc	Keping	7.619,00	7.656,00	37,00
12.	Piringan Hitam	Keping	100,00	100,00	0

Pengungkapkan data khasanah pada Balai Arsip Tsunami Aceh yang merupakan Kantor Daerah, sebagai berikut:

Data Khasanah Arsip Balai Arsip Tsunami Aceh (BATA) Tahun 2015

No.	Arsip	Satuan	Hasil Inventarisasi (Tahun 2014)	Jumlah Tahun 2015	Kenaikan
1.	Kertas	M Linier	8.689,8	8.813	123,2
2.	Kearsitekturan	M Linier	495	495	0
3.	Kartografi	Lembar	3.145	3.145	0
4.	Foto	Lembar	268	268	0
5.	Rekaman Suara	Kaset	52	52	0
6.	Optical Disc	Keping	1.238	1.238	0

Terdapat kenaikan pada arsip kertas pada Balai Arsip Tsunami Aceh (BATA) sebesar 123,2 ML berdasarkan hasil penyelamatan arsip statis BATA.

F.2.5 Reklasifikasi Barang Milik Negara (BMN)

- 1) Terdapat Belanja Pemeliharaan berupa pekerjaan pemasangan sekat ruangan kerja pegawai (partisi) di Gedung C Lantai 8 di ANRI senilai Rp 168.960.000 sesuai dengan SPM Nomor 02518 tanggal 07/12/2015 SP2D nomor

[Handwritten signature]

- 151391303026646 tanggal 14/12/2015, SPK No. PL.06/561.05/2015 tanggal 19/10/2015; BAST No. PL.06/561.07/2015 tanggal 23/11/2015; BAP No. PL.06/561.08/20154 tanggal 24/11/2015 yang memenuhi syarat kapitalisasi belanja modal Peralatan dan Mesin namun masih dibebankan pada belanja barang pemeliharaan;
- 2) Terdapat kesalahan dalam pembebanan transaksi pembelian belanja modal pengadaan peralatan pengolah data (Tablet Multi Fungsi) untuk kegiatan instansi pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK sebesar Rp 150.000.000 sesuai dengan nomor SPM 01274 tanggal 02/09/2015, SP2D nomor 151391303013147 tanggal 03/09/2015, SPK No. PL.03.01/494.05/2015 tgl 13/8/2015; BAST No. PL.03.01/494.07/2015 tgl 20/8/2015; yang pembebanannya menggunakan akun belanja modal 536111 seharusnya menggunakan akun belanja modal 532111 (Sudah dilakukan penyesuaian di Jurnal Umum tgl. 30/09/2015).
- 3) Terdapat kesalahan dalam pembebanan transaksi pembelian belanja modal pengadaan penambahan jaringan CCTV di lingkungan ANRI tahun 2015 sebesar Rp 256.344.000 sesuai dengan nomor SPM 02846 tanggal 22/12/2015, SP2D nomor 151391302049709 tanggal 23/12/2015, SPK No. PL.03.04/842.08/2015 tgl 02/12/2015; BAST No. PL.03.04/842.09/2015 tgl 22/12/2015; yang pembebanannya menggunakan akun belanja modal 533121 seharusnya menggunakan akun belanja modal 532111 (Sudah dilakukan penyesuaian di Jurnal Umum tgl. 31/12/2015).
- 4) Terdapat kesalahan dalam pembebanan transaksi pembelian belanja modal pengadaan buku referensi untuk kegiatan kajian pendidikan tinggi dan diklat kearsipan dan kegiatan pedoman retensi arsip sector perekonomian dan polhukam di Pusjibangsiskar sebesar Rp 3.771.250 sesuai dengan nomor SPM 02740 tanggal 15/12/2015, SP2D nomor 151391303029593 tanggal 23/12/2015, Kuitansi nomor 000147/15 tanggal 11/12/2015 dan Rp 10.018.500 dengan nomor SPM 02741 tanggal 15/12/2015, SP2D Nomor

- 151391303030104 tanggal 28/12/2015 ; yang pembebanannya menggunakan akun belanja modal 532111 seharusnya menggunakan akun belanja modal 536111 (Sudah dilakukan penyesuaian di Jurnal Umum tgl. 31/12/2015);
- 5) Terdapat Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa pekerjaan pemasangan kanopi garasi, perbaikan pintu pagar dan teralis atas bagian belakang rumah dians Deputi Konservasi senilai Rp 36.300.000 sesuai dengan SPM Nomor 01879 tanggal 28/10/2015, SP2D nomor 151391303019287 tanggal 29/10/2015 dengan kuitansi Nomor 710-01 tanggal 23/09/2015 yang memenuhi syarat kapitalisasi belanja modal Gedung dan Bangunan namun pembebanannya pada belanja barang pemeliharaan 523111 (sudah dilakukan penyesuaian di SIMAK-BMN dan SAIBA);
- 6) Terdapat Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya berupa pengadaan perbaikan peralatan diorama di ANRI senilai Rp 179.190.000 sesuai dengan SPM Nomor 02784 tanggal 15/12/2015 SP2D nomor 151391303031718 tanggal 28/12/2015, SPK No. PL.06/300.05/2015 tanggal 30/10/2015; BAST No. PL.06/300.07/2015 tanggal 3/12/2015; BAP No. PL.06/300.08/2015 tanggal 4/12/2015 yang memenuhi syarat kapitalisasi belanja modal Peralatan dan Mesin namun pembebanannya pada belanja barang pemeliharaan 523119 (sudah dilakukan penyesuaian di SIMAK-BMN dan SAIBA);
- 7) Penghentian aset dari penggunaan berasal dari penghapusan BMN yang tidak dapat digunakan lagi dikarenakan rusak berat dengan cara dijual/dilelang pada tahun 2015 berdasarkan Surat keputusan Kepala Arsip Nasional RI nomor 348A Tahun 2015 tentang Penghapusan BMN di lingkungan ANRI senilai Rp2.936.570.588 dan tambahan koreksi nilai audit BPK senilai Rp2.879.773.962, sehingga total nilai penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp5.816.344.550;
- 8) Pada Satker Balai Tsunami Aceh terdapat koreksi pencatatan nilai/kuantitas berasal koreksi Tim BPK atas pekerjaan perbaikan AC Sentral sebesar Rp5.005.000 yang

menggunakan belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi namun tidak masuk syarat kapitalisasi dimana tidak menambah kapasitas dan umur ekonomis sehingga perlu dikeluarkan dari laporan barang;

- 9) Nilai buku cetakan Subdirektorat Layanan dan Pemanfaatan yang digunakan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dicatat ke aset tetap lainnya senilai Rp228.867 (Hasil penilaian harga taksiran persediaan buku naskah sumber arsip terlampir di CaLK BMN sesuai dengan Keputusan Kepala ANRI No. 150.A Tahun 2016 tanggal 14 April 2016);
- 10) Koreksi yang berasal dari pemeriksaan Tim BPK buku cetakan Subdirektorat Layanan dan Pemanfaatan yang digunakan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat namun belum dicatat dalam aplikasi persediaan pada Laporan Keuangan Unaudited senilai Rp 425.596.424 (Hasil penilaian harga taksiran persediaan buku naskah sumber arsip terlampir di CaLK BMN sesuai dengan Keputusan Kepala ANRI No. 150.A Tahun 2016 tanggal 14 April 2016).

F.2.6 Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO)

Terdapat perbedaan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Arsip Nasional RI Tahun Anggaran 2015 dimana menurut Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dicatat sebesar Rp 10.577.067.174 dan menurut Laporan Operasional (LO) dicatat sebesar Rp 10.382.863.518. Perbedaan tersebut disajikan karena dalam Laporan Operasional, Pendapatan dibagi kedalam dua klasifikasi Kegiatan yaitu Kegiatan Operasional dan Non Operasional. Menurut Laporan Operasional, Pendapatan Negara Bukan Pajak termasuk kedalam kegiatan Operasional. Sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang menganut Basis Kas (*Cash Basic*) semua pendapatan yang telah disetorkan ke kas negara merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak tanpa memperhatikan klasifikasinya.



Pendapatan akrual LO diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program, sejalan dengan Paragraf 93 Lampiran 1.02 PSAP 01 dan Paragraf 23 Lampiran 1.03 PSAP 12.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN		
Pendapatan Negara dan Hibah		
Penerimaan Negara		
Penerimaan Negara Bukan Pajak		10,577,067,174
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan	407,726,800
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	14,700,000
423141	Pendapatan Sewa, Gedung, dan Bangunan	1,599,036,000
423216	Pendapatan Jasa Tenaga Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	513,775,800
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	80,683
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	7,797,363,500
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	45,295,538
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	27,966,200
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	161,469,756
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	67,700
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	9,585,197
KEGIATAN OPERASIONAL		
Pendapatan Operasional		
Pendapatan Negara Bukan Pajak		10,340,638,828
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		10,340,638,828
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan	407,726,800
423141	Pendapatan Sewa, Gedung, dan Bangunan	1,609,036,000
423216	Pendapatan Jasa Tenaga Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	513,775,800
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	80,683
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	7,797,363,500
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3,070,848
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	9,585,197
KEGIATAN NON OPERASIONAL		410,655,956
Pelepasan Aset Non Lancar		14,700,000
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		14,700,000
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	14,700,000
Kegiatan Non Operasional Lainnya		395,955,956
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya		395,955,956
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	234,418,500
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	161,469,756
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	67,700

[Handwritten signature]

F.2.7 Timbulnya akun piutang TGR

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Menurut Buletin Teknis Nomor 16 Tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual bahwa Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang. SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Tuntutan Ganti Rugi berasal dari tagihan pengembalian uang pemberian bantuan pendidikan bagi PNS ANRI Tahun 2014 sesuai dengan LHP BPK RI Nomor 125C/HP/XVI/05/2015 tanggal 22 Mei 2015, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Penetapan dan SKTM. Sesuai SKTM yang ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2015 oleh 44 orang maka pada tahun 2015 diakui piutang TGR dengan rincian sbb:

Kategori Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang TP/TGR Bagian Lancar	144.132.400	0,50%	720.662
Piutang Jangka Panjang	62.519.900	0,50%	312.600
Jumlah	206.652.300		1.033.262

F.2.8 Aset Tak Berwujud senilai Rp 9.078.456.505 pada Arsip Nasional tidak di Amortisasi

- Arsip Nasional RI saat ini belum menerapkan amortisasi aset tak berwujud dikarenakan sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana dijelaskan pada :

- Pasal 8 ayat (1) bahwa Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2015 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, dan;
 - Pasal 28 bahwa Penerapan atas Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pusat ini ANRI telah menetapkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 164 Tahun 2016 tentang Masa Manfaat Aset Tak Berwujud di Lingkungan ANRI.

F.2.9 Selisih Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin dan Gedung Bangunan pada Angka Asersi Final LK ANRI (BA 087) Tahun 2015 yang dimasukkan dalam LKPP Tahun 2015 (Audited) dengan angka Neraca SIMAK BMN.

- Terdapat selisih pencatatan nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp1.578.261 dimana dalam Angka Asersi Final LK ANRI Tahun 2015 tercatat sebesar Rp141.681.891.678 sedangkan di Neraca SIMAK BMN per 31 Desember 2015 sebesar Rp141.680.313.417. Nilai yang akan disesuaikan pada Semester I Tahun 2016 berdasarkan nilai yang tercatat di SIMAK BMN per 31 Desember 2015;
- Terdapat selisih pencatatan nilai akumulasi penyusutan

Gedung dan Bangunan senilai Rp1.578.261 dimana dalam Angka Asersi Final LK ANRI Tahun 2015 tercatat sebesar Rp37.385.415.907 sedangkan di Neraca SIMAK BMN per 31 Desember 2015 sebesar Rp37.386.994.168. Nilai yang akan disesuaikan pada Semester I Tahun 2016 berdasarkan nilai yang tercatat di SIMAK BMN per 31 Desember 2015.

✱

4

**LAPORAN YANG DIHASILKAN
OLEH APLIKASI SAIBA**

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2015
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan : NPSAIKT
Tanggal : 29-04-16
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2,789,351,900	
0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	10,000,000	
0	115212	Piutang Lainnya	298,664,780	
0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	144,132,400	
0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan		720,662
0	117111	Barang Konsumsi	710,880,950	
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	36,698,890	
0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	425,596,424	
0	117131	Bahan Baku	159,485,816	
0	117199	Persediaan Lainnya	31,116,725	
0	131111	Tanah	215,715,732,396	
0	132111	Peralatan dan Mesin	177,882,634,951	
0	133111	Gedung dan Bangunan	197,222,679,198	
0	134111	Jalan dan Jembatan	744,220,771	
0	134112	Irigasi	631,759,500	
0	134113	Jaringan	9,794,503,526	
0	135121	Aset Tetap Lainnya	12,527,828,439	
0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	34,320,000	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		141,680,313,417
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		37,386,994,168
0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		737,108,921
0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		113,049,584
0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan		4,021,110,185
0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		57,555,213
0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	62,519,900	
0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan		312,600
0	162151	Software	765,908,500	
0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	8,312,548,005	
0	166111	Aset Lain-lain	356,339,759	
0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	6,209,317,653	
0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi		2,861,125,772
0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		22,955,661
0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		642,668,432
0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		2,607,740,425
0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor		1,065,000

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2015
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 29-04-16
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	313111	Ditagikan ke Entitas Lain		161,454,661,944
0	313121	Diterima dari Entitas Lain	10,577,067,174	
0	313221	Transfer Masuk		160,872,000
0	391111	Ekuitas		436,517,365,710
0	391113	Koreksi Nilai Persediaan		456,012,264
0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		200,903,604
0	391117	Penyesuaian Nilai Persediaan		1,209,512,570
0	391119	Koreksi Lainnya		203,762,146
3	423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan		407,726,800
3	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		14,700,000
3	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		1,609,036,000
3	423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi		513,775,800
3	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		80,683
3	423291	Pendapatan Jasa Lainnya		7,797,363,500
3	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		3,070,848
3	423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara		234,618,500
3	423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain		9,585,197
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	22,562,322,180	
3	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS		3,143,000
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	389,536	
3	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		66,631
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,604,778,196	
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	441,255,236	
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	2,046,760,000	
3	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,266,160,000	
3	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS		2,400,000
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	791,953,240	
3	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,226,592,940	
3	511129	Beban Uang Makan PNS	3,528,785,850	
3	511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3,065,240,000	
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	491,520,000	
3	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS		4,065,000
3	512211	Beban Uang Lembur	250,347,000	
3	512211	Pengembalian Beban Uang Lembur		724,000
3	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	28,597,031,772	

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2015
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NPSAIKT
 Tanggal : 29-04-16
 Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)		864,814,246
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	4,030,859,212	
3	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran		21,912,000
3	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	618,933,800	
3	521113	Pengembalian Beban Penambah Daya Tahan Tubuh		2,037,500
3	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	137,322,147	
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	933,180,000	
3	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja		1,425,000
3	521211	Beban Bahan	6,630,418,767	
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	5,385,725,000	
3	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan		29,402,500
3	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,198,759,447	
3	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya		12,466,300
3	522111	Beban Langganan Listrik	7,659,299,645	
3	522112	Beban Langganan Telepon	173,102,033	
3	522113	Beban Langganan Air	95,584,970	
3	522131	Beban Jasa Konsultan	183,099,600	
3	522141	Beban Sewa	1,670,815,018	
3	522151	Beban Jasa Profesi	4,414,177,750	
3	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi		68,462,000
3	522191	Beban Jasa Lainnya	1,716,938,200	
3	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,476,287,795	
3	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	118,832,500	
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,725,007,284	
3	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,125,560,950	
3	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	172,030,750	
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	7,299,122,153	
3	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa		567,664,780
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	729,290,000	
3	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		150,000
3	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,365,598,500	
3	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		22,774,000
3	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,824,923,000	
3	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		750,000
3	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	611,950,220	

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2015
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NPSAIKT
 Tanggal : 29-04-16
 Halaman : 4

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri		34,119,600
3	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	161,718,284	
3	524219	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri		5,740,300
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11,880,114,169	
3	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6,277,669,550	
3	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	10,205,200	
3	591312	Beban Penyusutan Irigasi	21,731,289	
3	591313	Beban Penyusutan Jaringan	835,282,177	
3	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	15,120,775	
3	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	12,946,230	
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	13,774,569,473	
3	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	543,696,750	
3	593131	Beban Persediaan bahan baku	251,582,550	
3	593149	Beban Persediaan Lainnya	134,847,366	
3	594411	Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	720,662	
3	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan	312,600	
3	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3,263,600	
3	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	30,776,820	
3	596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	64,620	
		J U M L A H	802,567,884,463	802,567,884,463

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap. : LRAST
Tanggal : Wednesday, April
Halaman : 1
Prog.Id : lu_pastkt

No	URAIAN	2015				2014			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA	9,113,280,000	10,577,067,174	1,463,787,174	116.06	9,113,280,000	7,619,471,966	(1,493,808,034)	83.61
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	9,113,280,000	10,577,067,174	1,463,787,174	116.06	9,113,280,000	7,619,471,966	(1,493,808,034)	83.61
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)	9,113,280,000	10,577,067,174	1,463,787,174	116.06	9,113,280,000	7,619,471,966	(1,493,808,034)	83.61
B	BELANJA NEGARA								
B.1.1	Rupiah Murni	172,052,947,000	161,454,661,944	(10,598,285,056)	93.84	116,789,374,000	102,365,797,937	(14,423,576,063)	87.65
B.1.1.a	Belanja Pegawai	68,336,573,000	65,213,885,624	(3,122,687,376)	95.43	64,382,434,000	53,590,618,357	(10,791,815,643)	83.24
B.1.1.b	Belanja Barang	76,867,776,000	71,114,081,023	(5,753,694,977)	92.51	48,699,368,000	45,116,915,430	(3,582,452,570)	92.64
B.1.1.c	Belanja Modal	26,848,598,000	25,126,695,297	(1,721,902,703)	93.59	3,707,572,000	3,658,264,150	(49,307,850)	98.67
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)	172,052,947,000	161,454,661,944	(10,598,285,056)	93.84	116,789,374,000	102,365,797,937	(14,423,576,063)	87.65
C	PEMBIAYAAN								
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap. : LRAST
Tanggal : Wednesday, April
Halaman : 2
Prog Id : lu_pastkt

No	URAIAN	2015				2014			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Jakarta, 31 Desember 2015

Kuasa Pengguna Anggaran


Drs. M. Taufik, M.Si.
19600427198103100 1

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIKLT
 Tanggal : 27/04/16
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2015	2014	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	2,789,351,900	1,631,649,400	1,157,702,500	70.95
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	10,000,000	0	10,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	298,664,780	0	298,664,780	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	0	0	0.00
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	<i>298,664,780</i>	<i>0</i>	<i>298,664,780</i>	<i>0.00</i>
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	144,132,400	0	144,132,400	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(720,662)	0	(720,662)	0.00
<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	<i>143,411,738</i>	<i>0</i>	<i>143,411,738</i>	<i>0.00</i>
Persediaan	1,363,778,805	460,858,056	902,920,749	195.92
JUMLAH ASET LANCAR	4,605,207,223	2,092,507,456	2,512,699,767	120.08
ASET TETAP				
Tanah	215,715,732,396	215,554,860,396	160,872,000	0.07
Peralatan dan Mesin	177,882,634,951	163,329,168,856	14,553,466,095	8.91
Gedung dan Bangunan	197,222,679,198	193,952,010,548	3,270,668,650	1.69
Jalan, Irigasi dan Jaringan	11,170,483,797	11,182,670,697	(12,186,900)	(0.11)
Aset Tetap Lainnya	12,527,828,439	11,458,093,385	1,069,735,054	9.34
Konstruksi Dalam Pengerjaan	34,320,000	0	34,320,000	0.00
Akumulasi Penyusutan	(183,996,131,488)	(170,697,865,610)	(13,298,265,878)	7.79
JUMLAH ASET TETAP	430,557,547,293	424,778,938,272	5,778,609,021	1.36
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	62,519,900	0	62,519,900	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(312,600)	0	(312,600)	0.00
<i>Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	<i>62,207,300</i>	<i>0</i>	<i>62,207,300</i>	<i>0.00</i>
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	62,207,300	0	62,207,300	0.00
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	9,078,456,505	8,170,142,625	908,313,880	11.12
Aset Lain-lain	6,565,657,412	3,685,883,450	2,879,773,962	78.13
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(2,861,125,772)	0	(2,861,125,772)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	12,782,988,145	11,856,026,075	926,962,070	7.82
JUMLAH ASET	448,007,949,961	438,727,471,803	9,280,478,158	2.12

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIKLT
 Tanggal : 27/04/16
 Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2015	2014	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	3,273,364,518	2,210,106,093	1,063,258,425	48.11
Utang Jangka Pendek Lainnya	1,065,000	0	1,065,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,274,429,518	2,210,106,093	1,064,323,425	48.16
JUMLAH KEWAJIBAN	3,274,429,518	2,210,106,093	1,064,323,425	48.16
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	444,733,520,443	436,517,365,710	8,216,154,733	1.88
JUMLAH EKUITAS	444,733,520,443	436,517,365,710	8,216,154,733	1.88
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	448,007,949,961	438,727,471,803	9,280,478,158	2.12

Jakarta, 31 Desember 2015
 Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. M. Taufik, M.Si.
 19600427198103100 1

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2015 DAN 2014
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

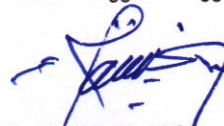
URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2015	2014	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Cukai	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	10,340,638,828	0	10,340,638,828	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	10,340,638,828	0	10,340,638,828	0
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	10,340,638,828	0	10,340,638,828	0
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	64,997,923,073	0	64,997,923,073	0
Beban Persediaan	14,160,999,389	0	14,160,999,389	0
Beban Barang dan Jasa	35,715,773,889	0	35,715,773,889	0
Beban Pemeliharaan	6,161,416,029	0	6,161,416,029	0
Beban Perjalanan Dinas	15,361,403,477	0	15,361,403,477	0
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0
Beban Bunga	0	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	19,053,069,390	0	19,053,069,390	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1,033,262	0	1,033,262	0
Beban Transfer	0	0	0	0
Beban Lain-Lain	0	0	0	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	155,451,618,509	0	155,451,618,509	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN	(145,110,979,681)	0	(145,110,979,681)	0

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2015 DAN 2014
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2015	2014	Jumlah	%
1	2	3	4	5
OPERASIONAL				
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	14,700,000	0	14,700,000	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	30,776,820	0	30,776,820	0
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(16,076,820)	0	(16,076,820)	0
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	234,618,500	0	234,618,500	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	64,620	0	64,620	0
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	234,553,880	0	234,553,880	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	218,477,060		218,477,060	
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0		0	
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(144,892,502,621)	0	(144,892,502,621)	0

Jakarta, 31 Desember 2015
 Kuasa Pengguna Anggaran


 Drs. M. Taufik, M.S.
 19600427198103100 1

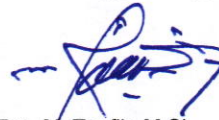
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2015	2014	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	436,517,365,710	0	436,517,365,710	0.00
SURPLUS/DEFISIT - LO	(144,892,502,621)	0	(144,892,502,621)	0.00
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	1,209,512,570	0	1,209,512,570	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	1,209,512,570	0	1,209,512,570	0.00
Penyesuaian Nilai Kewajiban	0	0	0	0.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	860,678,014	0	860,678,014	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	456,012,264	0	456,012,264	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	200,903,604	0	200,903,604	0.00
Lain-lain	203,762,146	0	203,762,146	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	151,038,466,770	0	151,038,466,770	0.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	8,216,154,733	0	8,216,154,733	0.00
EKUITAS AKHIR	444,733,520,443	0	444,733,520,443	0.00

Jakarta, 31 Desember 2015

Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. M. Taufik, M.Si.
 19600427198103100 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 29 April 2016
Halaman : 1
Prog.Id : lu_lrabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA								
01	RUPIAH MURNI								
01	PELAYANAN UMUM								
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI								
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	107,101,984,000	107,101,984,000	20,224,645,330	103,450,796,087	(1,118,553,365)	102,332,242,722	95.55	4,769,741,278
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	19,000,000,000	19,000,000,000	14,384,306,500	17,939,688,000	0	17,939,688,000	94.42	1,060,312,000
06	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	39,465,900,000	39,465,900,000	7,290,701,218	36,236,469,698	(512,413,492)	35,724,056,206	90.52	3,741,843,794
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01	165,567,884,000	165,567,884,000	41,899,653,048	157,626,953,785	(1,630,966,857)	155,995,986,928	95.20	9,571,897,072
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 01	165,567,884,000	165,567,884,000	41,899,653,048	157,626,953,785	(1,630,966,857)	155,995,986,928	95.20	9,571,897,072
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	165,567,884,000	165,567,884,000	41,899,653,048	157,626,953,785	(1,630,966,857)	155,995,986,928	95.20	9,571,897,072
04	PNBP								
01	PELAYANAN UMUM								
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI								
06	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	6,485,063,000	6,485,063,000	1,396,952,016	5,469,825,016	(11,150,000)	5,458,675,016	84.17	1,026,387,984
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 01	6,485,063,000	6,485,063,000	1,396,952,016	5,469,825,016	(11,150,000)	5,458,675,016	84.34	1,026,387,984
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 01	6,485,063,000	6,485,063,000	1,396,952,016	5,469,825,016	(11,150,000)	5,458,675,016	84.34	1,026,387,984
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04	6,485,063,000	6,485,063,000	1,396,952,016	5,469,825,016	(11,150,000)	5,458,675,016	84.34	1,026,387,984
	JUMLAH BELANJA	172,052,947,000	172,052,947,000	43,296,605,064	163,096,778,801	(1,642,116,857)	161,454,661,944	94.79	10,598,285,056
	II. IKHTISAR MENURUT ESELON I								
01	ARSIP NASIONAL	172,052,947,000	172,052,947,000	43,296,605,064	163,096,778,801	(1,642,116,857)	161,454,661,944	93.84	10,598,285,056

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap. : LRBKB 01
 Tanggal : 29 April 2016
 Halaman : 2
 Prog.Id : lu_lrabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA	172,052,947,000	172,052,947,000	43,296,605,064	163,096,778,801	(1,642,116,857)	161,454,661,944	94.79	10,598,285,056
	III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH								
0199	INSTANSI PUSAT	163,675,647,000	163,675,647,000	41,965,287,372	155,248,453,088	(1,621,728,309)	153,626,724,779	93.86	10,048,922,221
0100	DKI JAKARTA	196,340,000	196,340,000	46,721,000	183,618,000	0	183,618,000	93.52	12,722,000
0200	JAWA BARAT	180,633,000	180,633,000	15,000,000	176,119,000	0	176,119,000	97.50	4,514,000
0300	JAWA TENGAH	180,940,000	180,940,000	15,389,000	177,459,000	0	177,459,000	98.08	3,481,000
0400	DI YOGYAKARTA	184,918,000	184,918,000	22,000,250	158,228,700	0	158,228,700	85.57	26,689,300
0500	JAWA TIMUR	185,719,000	185,719,000	0	184,124,050	0	184,124,050	99.14	1,594,950
0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	2,291,583,000	2,291,583,000	322,101,042	2,213,470,103	(4,718,300)	2,208,751,803	96.39	82,831,197
0700	SUMATERA UTARA	188,734,000	188,734,000	0	169,306,800	0	169,306,800	89.71	19,427,200
0800	SUMATERA BARAT	183,012,000	183,012,000	0	181,958,650	0	181,958,650	99.42	1,053,350
0900	RIAU	184,152,000	184,152,000	0	173,689,600	0	173,689,600	94.32	10,462,400
1000	JAMBI	181,710,000	181,710,000	156,957,300	171,266,800	0	171,266,800	94.25	10,443,200
1100	SUMATERA SELATAN	181,500,000	181,500,000	18,928,000	156,877,600	0	156,877,600	86.43	24,622,400
1200	LAMPUNG	179,575,000	179,575,000	0	176,610,000	0	176,610,000	98.35	2,965,000
1300	KALIMANTAN BARAT	181,574,000	181,574,000	16,078,700	180,658,800	0	180,658,800	99.50	915,200
1400	KALIMANTAN TENGAH	184,492,000	184,492,000	7,500,000	182,265,200	0	182,265,200	98.79	2,226,800
1500	KALIMANTAN SELATAN	182,903,000	182,903,000	61,168,000	158,674,500	0	158,674,500	86.75	24,228,500
1600	KALIMANTAN TIMUR	371,352,000	371,352,000	48,422,800	159,595,000	0	159,595,000	42.98	211,757,000
1700	SULAWESI UTARA	185,041,000	185,041,000	0	181,455,000	0	181,455,000	98.06	3,586,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 29 April 2016
Halaman : 4
Prog.Id : lu_lrabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	22,822,591,000	22,622,591,000	1,755,333,440	22,560,257,880	(3,143,000)	22,557,114,880	99.71	65,476,120
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	583,000	583,000	25,386	388,343	(66,631)	321,712	55.18	261,288
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,478,700,000	1,618,700,000	125,202,248	1,604,643,496	0	1,604,643,496	99.13	14,056,504
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	467,554,000	467,554,000	34,741,553	441,158,526	0	441,158,526	94.35	26,395,474
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,350,348,000	2,210,348,000	156,730,000	2,046,760,000	0	2,046,760,000	92.60	163,588,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,186,994,000	1,286,994,000	99,095,000	1,265,290,000	(2,400,000)	1,262,890,000	98.13	24,104,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,225,272,000	1,025,272,000	0	791,478,866	0	791,478,866	77.20	233,793,134
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,500,000,000	1,500,000,000	105,226,260	1,226,592,940	0	1,226,592,940	81.77	273,407,060
511129	Belanja Uang Makan PNS	4,500,000,000	4,500,000,000	655,420,000	3,631,376,000	0	3,631,376,000	80.70	868,624,000
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	3,340,000,000	3,340,000,000	255,100,000	3,066,440,000	0	3,066,440,000	91.81	273,560,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0.00	30,000,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	673,804,000	673,804,000	38,745,000	491,525,000	(4,065,000)	487,460,000	72.34	186,344,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	39,575,846,000	39,275,846,000	3,225,618,887	37,125,911,051	(9,674,631)	37,116,236,420	94.53	2,159,609,580
5122	Belanja Lembur								
512211	Belanja Uang Lembur	333,530,000	333,530,000	55,394,000	250,347,000	(724,000)	249,623,000	74.84	83,907,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	333,530,000	333,530,000	55,394,000	250,347,000	(724,000)	249,623,000	75.06	83,907,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito								
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	27,270,197,000	28,727,197,000	9,223,099,950	28,712,840,450	(864,814,246)	27,848,026,204	96.94	879,170,796
512412	Belanja Pegawai Transito	1,157,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	28,427,197,000	28,727,197,000	9,223,099,950	28,712,840,450	(864,814,246)	27,848,026,204	99.95	879,170,796
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	68,336,573,000	68,336,573,000	12,504,112,837	66,089,098,501	(875,212,877)	65,213,885,624	96.71	3,122,687,376

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 29 April 2016
Halaman : 5
Prog.Id : lu_lrabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,888,627,000	4,884,821,000	711,308,998	4,429,334,662	(21,912,000)	4,407,422,662	90.23	477,398,338
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	795,343,000	714,984,000	89,239,000	621,930,150	(2,037,500)	619,892,650	86.70	95,091,350
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	168,658,000	160,318,000	55,922,500	137,322,147	0	137,322,147	85.66	22,995,853
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	841,910,000	1,028,130,000	227,240,000	981,080,000	(1,425,000)	979,655,000	95.29	48,475,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	404,800,000	200,919,000	0	195,720,000	0	195,720,000	97.41	5,199,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	7,099,338,000	6,989,172,000	1,083,710,498	6,365,386,959	(25,374,500)	6,340,012,459	91.07	649,159,541
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	13,953,507,000	20,094,724,000	3,036,682,175	18,829,346,375	0	18,829,346,375	93.70	1,265,377,625
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,743,095,000	6,162,635,000	869,720,000	5,535,735,000	(29,402,500)	5,506,332,500	89.35	656,302,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,976,105,000	2,408,452,000	1,445,269,447	2,254,769,447	(12,466,300)	2,242,303,147	93.10	166,148,853
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	21,672,707,000	28,665,811,000	5,351,671,622	26,619,850,822	(41,868,800)	26,577,982,022	92.86	2,087,828,978
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	944,864,000	787,150,950	929,909,450	0	929,909,450	98.42	14,954,550
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	944,864,000	787,150,950	929,909,450	0	929,909,450	98.42	14,954,550
5221	Belanja Jasa								
522111	Belanja Langganan Listrik	6,372,000,000	7,754,556,000	612,394,685	7,588,565,325	0	7,588,565,325	97.86	165,990,675
522112	Belanja Langganan Telepon	258,000,000	213,600,000	27,932,628	165,783,985	0	165,783,985	77.61	47,816,015
522113	Belanja Langganan Air	99,000,000	99,000,000	27,609,035	91,381,215	0	91,381,215	92.30	7,618,785
522131	Belanja Jasa Konsultan	143,430,000	183,130,000	47,999,600	183,099,600	0	183,099,600	99.98	30,400
522141	Belanja Sewa	2,636,276,000	1,864,696,000	503,357,400	1,670,815,018	0	1,670,815,018	89.60	193,880,982

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap. : LRBKB 01
Tanggal : 29 April 2016
Halaman : 7
Prog.Id : lu_lrabi1b

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,339,446,000	20,321,069,000	13,024,673,516	19,652,738,216	0	19,652,738,216	96.71	668,330,784
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	6,339,446,000	20,321,069,000	13,024,673,516	19,652,738,216	0	19,652,738,216	96.71	668,330,784
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan								
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	14,520,000,000	4,364,413,000	3,328,636,500	3,512,845,750	0	3,512,845,750	80.49	851,567,250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	14,520,000,000	4,364,413,000	3,328,636,500	3,512,845,750	0	3,512,845,750	80.49	851,567,250
5361	Belanja Modal Lainnya								
536111	Belanja Modal Lainnya	1,140,550,000	2,163,116,000	857,789,871	1,961,111,331	0	1,961,111,331	90.66	202,004,669
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	1,140,550,000	2,163,116,000	857,789,871	1,961,111,331	0	1,961,111,331	90.66	202,004,669
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	21,999,996,000	26,848,598,000	17,211,099,887	25,126,695,297	0	25,126,695,297	93.59	1,721,902,703
	JUMLAH BELANJA	172,052,947,000	172,052,947,000	43,296,605,064	163,096,778,801	(1,642,116,857)	161,454,661,944	94.79	10,598,285,056

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap. : LRBWW 01
Tanggal : 29-04-16
Halaman : 1
Prog.Id : lu_irabw1t

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D TAHUN INI	TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA							
01	RUPIAH MURNI							
01	PELAYANAN UMUM							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI							
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	0	0	644,850,714	473,702,651	1,118,553,365	0.00	0
06	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	0	0	193,812,714	318,600,778	512,413,492	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01.01	0	0	838,663,428	792,303,429	1,630,966,857	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01	0	0	838,663,428	792,303,429	1,630,966,857	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01	0	0	838,663,428	792,303,429	1,630,966,857	0.00	0
04	PNBP							
01	PELAYANAN UMUM							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI							
06	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	0	0	11,150,000	0	11,150,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01.01	0	0	11,150,000	0	11,150,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01	0	0	11,150,000	0	11,150,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 04	0	0	11,150,000	0	11,150,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA	0	0	849,813,428	792,303,429	1,642,116,857	0.00	0
	II. IKHTISAR MENURUT KEGIATAN							
3614	Peningkatan Layanan Hukum, Pembinaan Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan Pengelolaan Pegawai di Ling	0	0	24,567,600	52,876,300	77,443,900	0.00	0
3615	Peningkatan Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Ketatausahaan Pimpin	0	0	15,427,576	17,223,791	32,651,367	0.00	0

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBWW 01
Tanggal : 29-04-16
Halaman : 2
Prog.Id : lu_irabw1t

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D TAHUN INI	TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3616	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Anggaran serta Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Anri	0	0	602,050,838	400,748,760	1,002,799,598	0.00	0
3617	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Anri	0	0	2,804,700	2,853,800	5,658,500	0.00	0
3620	Penilaian dan Akuisisi Arsip	0	0	27,509,900	65,275,892	92,785,792	0.00	0
3622	Pembinaan Kearsipan Pusat	0	0	22,734,338	39,542,179	62,276,517	0.00	0
3623	Pemanfaatan Arsip	0	0	4,566,800	18,031,100	22,597,900	0.00	0
3624	Pengolahan Arsip Statis	0	0	0	3,000	3,000	0.00	0
3625	Preservasi Kearsipan	0	0	38,642,050	1,872,000	40,514,050	0.00	0
3626	Peningkatan Jasa Sistem dan Pembenahan, Penyimpanan, dan Perawatan Arsip	0	0	14,153,300	2,072,500	16,225,800	0.00	0
3627	Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	0	0	15,098,100	81,638,598	96,736,698	0.00	0
3629	Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional	0	0	14,946,996	1,772,250	16,719,246	0.00	0
5356	Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan	0	0	435,600	1,997,000	2,432,600	0.00	0
5357	Pelaksanaan Bimbingan SDM Kearsipan dan Sertifikasi	0	0	8,687,500	532,500	9,220,000	0.00	0
5358	Pembinaan Kearsipan Daerah I	0	0	30,237,550	56,316,309	86,553,859	0.00	0
5359	Pembinaan Kearsipan Daerah II	0	0	20,343,780	28,867,450	49,211,230	0.00	0
5360	Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	0	0	1,600,000	12,000,000	13,600,000	0.00	0
5361	Pengelolaan Data dan TIK ANRI	0	0	6,006,800	8,680,000	14,686,800	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA	0	0	849,813,428	792,303,429	1,642,116,857	0.00	0
	III. IKHTISAR MENURUT SATUAN KERJA							
060073	BADAN ARSIP PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM	0	0	0	1,483,000	1,483,000	0.00	0
200033	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0	0	7,849,000	804,148	8,653,148	0.00	0

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBWW 01
Tanggal : 29-04-16
Halaman : 3
Prog.Id : lu_lrabw1t

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D TAHUN INI	TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210026	KANTOR ARSIP DAERAH PROVINSI MALUKU	0	0	3,293,100	0	3,293,100	0.00	0
240022	BADAN ARSIP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0	0	0	18,000	18,000	0.00	0
250038	KANTOR ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA	0	0	788,000	0	788,000	0.00	0
300065	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0.00	0
310066	BADAN ARSIP DAERAH PROVINSI GORONTALO	0	0	0	1,718,000	1,718,000	0.00	0
450448	ARSIP NASIONAL RI	0	0	836,356,928	785,371,381	1,621,728,309	0.00	0
681464	BALAI ARSIP TSUNAMI ACEH	0	0	1,526,400	1,708,900	3,235,300	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA	0	0	849,813,428	792,303,429	1,642,116,857	0.00	0
	IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA DAN MAK							
51	PENGEMBALIAN BEBAN PEGAWAI							
5111	Jenis belanja tidak ada							
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	0	3,143,000	0	3,143,000	0.00	0
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	62,114	4,517	66,631	0.00	0
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	0	550,000	1,850,000	2,400,000	0.00	0
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	3,695,000	370,000	4,065,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN JENIS BELANJA 5111	0	0	7,450,114	2,224,517	9,674,631	0.00	0
5122	Jenis belanja tidak ada							
512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	0	0	0	724,000	724,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN JENIS BELANJA 5122	0	0	0	724,000	724,000	0.00	0
5124	Jenis belanja tidak ada							
512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	0	533,542,473	331,271,773	864,814,246	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN JENIS BELANJA 5124	0	0	533,542,473	331,271,773	864,814,246	0.00	0

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBWW 01
Tanggal : 29-04-16
Halaman : 4
Prog.Id : lu_lrabw1t

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D TAHUN INI	TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51	0	0	540,992,587	334,220,290	875,212,877	0.00	0
52	PENGEMBALIAN BEBAN BARANG							
5211	Jenis belanja tidak ada							
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	0	13,552,000	8,360,000	21,912,000	0.00	0
521113	Pengembalian Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	0	2,037,500	2,037,500	0.00	0
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	285,000	1,140,000	1,425,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN JENIS BELANJA 5211	0	0	13,837,000	11,537,500	25,374,500	0.00	0
5212	Jenis belanja tidak ada							
521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	0	19,842,500	9,560,000	29,402,500	0.00	0
521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0	12,466,300	12,466,300	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN JENIS BELANJA 5212	0	0	19,842,500	22,026,300	41,868,800	0.00	0
5221	Jenis belanja tidak ada							
522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	0	11,305,000	57,157,000	68,462,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN JENIS BELANJA 5221	0	0	11,305,000	57,157,000	68,462,000	0.00	0
5241	Jenis belanja tidak ada							
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	0	256,026,341	311,638,439	567,664,780	0.00	0
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	150,000	150,000	0.00	0
524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	7,060,000	15,714,000	22,774,000	0.00	0
524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	750,000	0	750,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN JENIS BELANJA 5241	0	0	263,836,341	327,502,439	591,338,780	0.00	0
5242	Jenis belanja tidak ada							
524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	0	0	34,119,600	34,119,600	0.00	0
524219	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	0	0	5,740,300	5,740,300	0.00	0

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(dalam rupiah)**

Kode Lap. : LRBWW 01
Tanggal : 29-04-16
Halaman : 5
Prog.Id : lu_frabw1t

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D TAHUN INI	TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH PENGEMBALIAN JENIS BELANJA 5242	0	0	0	39,859,900	39,859,900	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	308,820,841	458,083,139	766,903,980	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA	0	0	849,813,428	792,303,429	1,642,116,857	0.00	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KD. LAPORAN : LRPK.W01
TANGGAL : 29/04/16
HAL : 1
PROG. ID : lui_pend01

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TRIWULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	I. IKHTISAR MENURUT MAP						
	Penerimaan Dalam Negeri						
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
423	PNBP LAINNYA						
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan						
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan						
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	438,823,000	326,633,000	407,726,800	0	407,726,800	92.91
	Jumlah Penerimaan 42311	438,823,000	326,633,000	407,726,800	0	407,726,800	92.91
42312	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN						
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 42312	0	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000	96.26
42314	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN						
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,000,000,000	1,310,201,000	1,599,036,000	0	1,599,036,000	159.90
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	10,000,000	0	0	0	0	0.00
	Jumlah Penerimaan 42314	1,010,000,000	1,310,201,000	1,599,036,000	0	1,599,036,000	139.52
	Jumlah Penerimaan 4231	1,448,823,000	1,651,534,000	2,021,462,800	0	2,021,462,800	139.52
4232	Pendapatan Jasa						
42321	Pendapatan Jasa I						
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	500,000,000	513,775,800	513,775,800	0	513,775,800	102.75
	Jumlah Penerimaan 42321	500,000,000	513,775,800	513,775,800	0	513,775,800	130.09
42322	Pendapatan Jasa II						
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	6,000,000	80,683	80,683	0	80,683	1.34
	Jumlah Penerimaan 42322	6,000,000	80,683	80,683	0	80,683	129.69
42329	Pendapatan Jasa Lainnya						

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KD. LAPORAN : LRPK.W01
TANGGAL : 29/04/16
HAL : 2
PROG. ID : : lui_pend01

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TRIWULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	7,082,457,000	7,681,863,500	7,797,363,500	0	7,797,363,500	110.09
	Jumlah Penerimaan 42329	7,082,457,000	7,681,863,500	7,797,363,500	0	7,797,363,500	114.33
	Jumlah Penerimaan 4232	7,588,457,000	8,195,719,983	8,311,219,983	0	8,311,219,983	114.33
4237	Pendapatan Iuran dan Denda						
42375	Pendapatan Denda						
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	45,295,538	45,295,538	0	45,295,538	0.00
	Jumlah Penerimaan 42375	0	45,295,538	45,295,538	0	45,295,538	114.83
	Jumlah Penerimaan 4237	0	45,295,538	45,295,538	0	45,295,538	114.83
4239	Pendapatan Lain-lain						
42392	Pendapatan Pelunasan Piutang						
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	27,966,200	27,966,200	0	27,966,200	0.00
423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	15,000,000	0	0	0	0	0.00
	Jumlah Penerimaan 42392	15,000,000	27,966,200	27,966,200	0	27,966,200	114.95
42395	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II						
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	61,000,000	29,888,836	161,469,756	0	161,469,756	264.70
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	67,700	0	67,700	0.00
	Jumlah Penerimaan 42395	61,000,000	29,888,836	161,537,456	0	161,537,456	115.95
42399	Pendapatan Lain-lain						
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	9,585,197	9,585,197	0	9,585,197	0.00
	Jumlah Penerimaan 42399	0	9,585,197	9,585,197	0	9,585,197	116.06
	Jumlah Penerimaan 4239	76,000,000	67,440,233	199,088,853	0	199,088,853	116.06
	Jumlah Penerimaan 423	9,113,280,000	9,959,989,754	10,577,067,174	0	10,577,067,174	116.06
	Jumlah Penerimaan 42	9,113,280,000	9,959,989,754	10,577,067,174	0	10,577,067,174	116.06
	Jumlah Penerimaan Dalam Negeri	9,113,280,000	9,959,989,754	10,577,067,174	0	10,577,067,174	116.06
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	9,113,280,000	9,959,989,754	10,577,067,174	0	10,577,067,174	116.06
	II. IKHTISAR MENURUT ESELON						

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KD. LAPORAN : LRPK.W01
TANGGAL : 29/04/16
HAL : 3
PROG. ID : : lui_pend01

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TRIWULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	ARSIP NASIONAL	9,113,280,000	9,959,989,754	10,577,067,174	0	10,577,067,174	116.06
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	9,113,280,000	9,959,989,754	10,577,067,174	0	10,577,067,174	116.06
	III. IKHTISAR MENURUTPUSAT-WILAYAH						
0199	PUSAT	9,113,280,000	9,950,245,071	10,567,322,491	0	10,567,322,491	115.95
0100	DKI JAKARTA	0	9,372	9,372	0	9,372	0.00
0200	JAWA BARAT	0	9,520,000	9,520,000	0	9,520,000	0.00
0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0	143,500	143,500	0	143,500	0.00
1600	KALIMANTAN TIMUR	0	71,311	71,311	0	71,311	0.00
2900	BANTEN	0	500	500	0	500	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	9,113,280,000	9,959,989,754	10,577,067,174	0	10,577,067,174	116.06

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN
 MENURUT JENIS SATUAN KERJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 JENIS SATKER : KP KANTOR PUSAT

KD. LAPORAN : LRPK.W01
 TANGGAL : 29/04/16
 HAL : 1
 PROG. ID : lui_penblank

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN			% REAL. PEND
			JUMLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN LALU	TRIWULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7
			----- tidak ada data yang dicetak -----			
	JUMLAH PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN HIBAH	-----	-----	-----	-----	-----